



TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**KINERJA PEMBANGUNAN DESA TERPENCIL DAN
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA TERTINGGAL DI
KECAMATAN SESAYAP HILIR, KABUPATEN TANA TIDUNG,
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelara Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

FIRMAN RUDDING

NIM. 501574868

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2019


UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM ADMINISTRASI PUBLIK

SURAT PERNYATAAN

TAPM berjudul Kinerja Pembangunan Desa Terpencil dan Percepatan
Pembangunan Desa Tertinggal Di Kecamatan Sesayap Hilir
Adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun di rujuk
telah saya nyatakan dengan benar, apabila dikemudian hari ternyata di temukan
adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sangsi Akademis

Tarakan, 15 November 2018

Yang Menyatakan


Firman Rudding
NIM: 501574868



ABSTRAK

Kinerja Pembangunan Desa Terpencil dan Percepatan Pembangunan Desa Tertinggal Di Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara

Firman Rudding
Universitas Terbuka
firmanannasausan@gmail.com

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan dengan menjalankan perogram-program pembangunan desa secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja pembangunan desa terpencil, kinerja percepatan pembangunan desa tertinggal, mengidentifikasi faktor penghambat, pendukung, dan mendeskripsikan upaya pemerintah kecamatan dalam menanggulangi faktor-faktor penghambat dalam membangun desa.

Lokasi penelitian di Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung dilapangan.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa kinerja pembangunan desa tepencil dan desa tertinggal belum cukup optimal, hasilnya masih belum memuaskan dilihat dari tiga aspek yaitu; (1). Tersedianya infrastruktur fisik dan sosial, pada aspek ini belum memadainya prasarana kebutuhan dasar masyarakat yaitu air, listrik. Sedangkan akses transportasi yaitu dermaga, jalan masih belum terpenuhi secara merata di desa. (2). Terlaksananya pembangunan ekonomi, pada aspek ini belum maksimal, sektor pertanian menurun baik dari hasil maupun pelaku pertanian dan pelaku usaha pasar tidak berjalan. dan (3). Terciptanya kelestarian lingkungan, pada aspek ini kesadaran akan kelestarian lingkungan masyarakat dilakukan dengan tindakan nyata masyarakat yaitu; dengan membuang sampah pada tempatnya, ikut penanaman pohon dan kerja bakti rutin, hanya berlangsung dibeberapa desa saja, untuk desa terpencil jarang dilakukan.

Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dalam menghadapi permasalahan/hambatan yaitu; a. mengupayakan lahan kehidupan masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan produksi dikeluarkan menjadi hutan non produksi, b. Mengupayakan program peningkatan sdm masyarakat secara berkelanjutan, c. mengupayakan pertemuan tiap bulannya antara camat, kepala desa, lembaga desa dan pimpinan instansi yang ada di kecamatan untuk menyatukan visi dan misi, d. Mengupayakan lembaga desa mendapatkan dana operasional. e. mengupayakan Dokumen RPJMDes diserahkan pada Kecamatan, dan setiap pencairan tahapan dana ADD dan DD mesti melewati tim verifikasi kecamatan.

Kata Kunci : Kinerja, Pembangunan Desa, Desa Terpencil dan Desa Tertinggal

ABSTRACT

**Performance of Remote village Development and Acceleration of Development
Disadvantaged village in Sesayap Hilir District, Tana Tidung Regency,
North Kalimantan Province**

**Firman Rudding
University Terbuka
firmanannasausan@gmail.com**

The village of development aims to improve the welfare of village communities, the quality of human life and poverty reduction by carrying out village development programs as a whole. This study aims to analyze the performance of remote village development, the accelerated performance of under developed village development, identify factors of development, support, and describe the efforts of the sub-district government in overcoming the inhibiting factors in developing the village.

This Research location in Sesayap Hilir District. In this study, the method used is descriptive qualitative, the data used are primary and secondary data, data collection is done by observation, interview, and documentation directly.

The results of the research obtained show that the performance of remote village development and under developed villages is not optimal, the results are not satisfactory if look at from three aspects, that is: (1). Basicly, the physical and social infrastructure aspect insufficient, the primarily needs of the community such as water and electricity is unfulfilled, the other problems are transportation access like a harbour and road on a village is not full distributed. (2). The economic growth is not maximal, in this aspect the agricultural sector has declined, from agricultural and market entrepreneurs are stagnant. and (3). The aspect of environmental sustainability is unfulfilled. Basicly, in this aspect awareness of the preservation of the community's environment is carried out by real actions of society, such as : by dumping garbage on trash, planting together activity with village community and another activity by community, it only takes place in a few villages, and for the isolated villages is rarely.

The efforts made by the district government in dealing with problems / obstacles are : a. striving for community land that is included in the production forest area to be issued become non-production forest, b. Striving for sustainable human resources improvement programs, c. effort to seek monthly meetings between the head of sub-district, the head of village , village institutions and the head of institution in the sub-district to combaining the vision and mission, d. Strive for village institutions to get add operational funds, e. to strive the village RPJM Document to be submitted to the Subdistrict, and every disbursement of the ADD and DD funds must pass the sub-district verification team.

**Keywords : Performance, village Development, Remote Village and
Disadvantaged village**

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

NAMA : Firman Rudding
 NIM : 501574868
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Judul TAMP : Kinerja Pembangunan Desa Terpencil dan Percepatan
 Pembangunan Desa Tertinggal Di Kecamatan Sesayap
 Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara

Telah dipertahankan di hadapan sidang panitia penguji
 tesis Program Pasca Sarjana, Program Magister
 Administrasi Publik, Universitas Terbuka Pada :

Hari/Tanggal : 01 Desember 2018
 Waktu : 09.00 s/d 10.30 WIB

Telah dinyatakan lulus

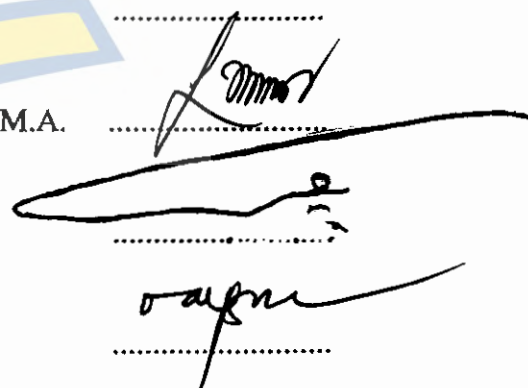
PANITIA PENGUJI TAMP

Ketua Komisi Penguji : Dr. Milwan, S.Sos, M.Si.

Penguji Ahli : Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.sos, M.A.

Pembimbing I : Dr. Samodra Wibawa, M.Sc

Pembimbing II : Dr. Siti Aisyah, M.Si



.....

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM


NAMA : Firman Rudding
NIM : 501574868
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul TAMP : Kinerja Pembangunan Desa Terpencil dan Percepatan
Pembangunan Desa Tertinggal Di Kecamatan Sesayap
Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara


Hari/Tanggal : 15 November 2018
Waktu :

Meyetujui:

Pembimbing II


Pembimbing I


Dr. Siti Aisyah, M.Si
NIP. 19680612 199903 2 001



Dr. Samodra Wibawa, M.Sc
NIP. 19650827 199103 1 001

Mengetahui:

Ketua Pascasarjana Hukum, Sosial
dan Politik


Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 19591027 198603 1 003

Dekan FHISIP


Dr. Sofjan Aripin, M.Si
NIP. 19660619 199203 1 002

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan yang maha pemilik segala sesuatu, yang telah memberikan taufik dan hidayah, berikut kemudahan dan kesehatan pada penulis sehingga Tugas Akhir Program Magister dengan judul Kinerja Pembangunan Desa Terpencil dan Percepatan Pembangunan Desa Tertinggal di Kecamatan Sesayap Hilir ini dapat diselesaikan. Yang dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar kesarjanaan Strata 2 (S2). terselesaikannya penulisan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam proses penelitian maupun selama penulisan. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Samodra Wibawa., M.Sc selaku dosen pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan tesis ini.
2. Ibu Dr. Siti Aisyah. M.Si selaku dosen pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan semangat serta motivasi selama penyusunan tesis.
3. Bapak Prof. Drs. Ojat Drajat, M.Bus, Ph.D sebagai rektor Universitas Terbuka
4. Kedua orang tua ku, Istri dan Anak, atas kepercayaan, kesabaran, dukungan moril dan materi serta semangat yang tak pernah berhenti sehingga menjadi kekuatanku selama menyelesaikan tesis ini.

5. Bapak Dr. Liestyodono Bawono Irianto, M.Si Sebagai direktur program Pascasarjana Universitas Terbuka
6. Bapak Dr. Sofyan Arifin, M.Si sebagai Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Tarakan
7. Bapak Camat/Sekretaris Camat beserta staf Kecamatan Sesayap Hilir atas dukungan dan bantuan selama melakukan penelitian.
8. Bapak Jusriansyah, SE, M.AP Sebagai pengurus Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) di Tana Tidung.
9. Teman- Teman Mahasiswa Pascaserjana Universitas Terbuka di Kabupaten Tana Tidung. Yang selalu memberikan semangat,motivasi.

Terimakasih yang tak terhingga serta permohonan maaf yang setulusnya kepada semua pihak, yang tidak sempat penulis cantumkan namanya satu persatu, semoga bantuannya dapat bernilai ibadah dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT, Mudah-Mudahan berguna, terutama Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan Sesayapp Hilir, maupun Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Dapat dipastikan bahwa tugas akhir program Magister (TAPM) ini tidak sempurna oleh karena itu saran dan kritik pembaca sangat diharapkan dan dihargai sebagai bahan penyempurnaan selanjutnya.

Tana Tidung, Desember 2018

Firman Rudding

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Pernyataan | i |
| Lembar Pengesahan..... | ii |
| Lembar Persetujuan TAPM..... | iii |
| Abstrak | iv |
| Abstract | v |
| Kata Pengantar | vi |
| Daftar Isi..... | viii |
| Daftar Gambar | x |
| Daftar Tabel..... | xi |
| Daftar Grafik | xiii |
| Daftar Lampiran | xv |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah Penelitian..... | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Kegunaan Penelitian | 10 |
| E. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA..... | 12 |
| A. Penelitian yang Relevan | 12 |
| B. Konsep Pembangunan Desa | 16 |
| C. Pembangunan Desa Terpencil dan Tertinggal..... | 22 |
| D. Kinerja Pembangunan Desa | 27 |
| E. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Pembangunan Desa | 28 |
| F. Kerangka Pikir Penelitian..... | 37 |
| G. Definisi Konseptual dan Oprasional | 39 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| BAB III. METODE PENELITIAN | 42 |
| A. Jenis Penelitian | 42 |
| B. Sumber Informasi | 42 |
| C. Instrumen Peneliti..... | 44 |
| D. Prosedur Pengumpulan Data | 45 |
| E. Metode Analisa Data | 46 |
| BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 48 |
| A. Profil Kecamatan Sesayap Hilir | 48 |
| B. Kinerja Pembangunan Desa Terpencil | 73 |
| C. Kinerja Percepatan Pembangunan Desa Tertinggal | 79 |
| D. Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman..... | 106 |
| E. Upaya Pemerintah Kecamatan Dalam Menanggulangi Hambatan..... | 119 |
| BAB V. PENUTUP | 124 |
| A. Kesimpulan..... | 124 |
| B. Saran | 128 |
| DAFTAR PUSTAKA | 133 |

DAFTAR GAMBER

| | |
|--------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Pikir..... | 39 |
|--------------------------------|----|



DAFTAR TABEL

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 Daftar Jumlah Status Desa Secara Nasional | 1 |
| Tabel 1.2 Jumlah Desa di Provinsi Kalimantan Utara IDM 2016 | 3 |
| Tabel 1.3 Jumlah Status Desa di Kabupaten Tana Tidung IDM 2016..... | 4 |
| Tabel 1.4 Nama-Nama Desa Tertinggal Di Kecamatan Sesayap Hilir..... | 8 |
| Tabel 2.1 Penelitian yang releva..... | 16 |
| Tabel 3.1 Sumber Informasi Penelitian..... | 43 |
| Tabel 4.1 Nama dan Luas Pulau..... | 50 |
| Tabel 4.2 Ketinggian Desa Dari Permukaan Laut Menurut Lokasi Pengukuran..... | 51 |
| Tabel 4.3 Jenis Penggunaan Lahan Tahun 2016 | 52 |
| Tabel 4.4 Rata-rata Suhu Udara, Kelembaban, Tekanan Udara, Kecepatan Angin | 53 |
| Tabel 4.5 Desa dan Luas Wilayah Masing-masingnya, 2016 | 56 |
| Tabel 4.6 Banyaknya Kaur, Bendahara dan Staff Desa menurut Desa 2016 | 57 |
| Tabel 4.7 Banyaknya BPD dan LPM menurut Desa, 2016..... | 58 |
| Tabel 4.8 Klasifikasi Desa menurut Kementrian, 2016 | 59 |
| Tabel 4.9 Banyaknya Pegawai Negeri Sipil Daerah menurut Eselon dan Jenis Kelamin Tahun 2016 | 60 |
| Tabel 4.10 Struktur Organisasi Kecamatan Sesayap Hilir, 2017 | 61 |
| Tabel 4.11 Pagu Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Desa, 2017..... | 62 |
| Tabel 4.12 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk, 2016..... | 64 |
| Tabel 4.13 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin, 2016 | 65 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 4.14 Banyaknya Transmigrasi dan Penyebarannya Menurut Desa, 2016..... | 67 |
| Tabel 4.15 Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur, 2016..... | 68 |
| Tabel 4.16 Jumlah Rumah Tangga Penerima Raskin menurut Desa, 2016..... | 70 |
| Tabel 4.17 Banyaknya armada Speed boat menurut Desa, 2016..... | 75 |
| Tabel 4.18 Perkembangan Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan, 2016..... | 75 |
| Tabel 4.19 Perkembangan Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan, 2016..... | 79 |
| Tabel 4.20 Prasarana kebutuhan dasar masyarakat Kecamatan Sesayap Hilir | 80 |
| Tabel 4.21 Daftar sarana ekonomi desa di Kecamatan Sesayap Hilir (pasar dan industri) | 82 |
| Tabel 4.22 Banyaknya Fasilitas Kesehatan, 2016..... | 84 |
| Tabel 4.23 Banyaknya Tenaga Kesehatan, 2016 | 85 |
| Tabel 4.24 Jumlah Sekolah menurut Desa, 2016 | 88 |
| Tabel 4.25 Jumlah Sekolah, Banyaknya Murid, dan Guru di Berbagai Jenjang Pendidikan Tahun Ajaran 2016/2017 | 89 |
| Tabel 4.26 Penggunaan Lahan, 2016 | 92 |
| Tabel 4.27 Luas Panen dan Luas Tanam Padi Palawija, 2016 (Ha) | 93 |
| Tabel 4.28 Luas Panen dan Luas Tanam Padi Palawija, 2016 (Ha) | 93 |
| Tabel 4.29 Populasi Ternak Tahun 2016 (Ekor) | 95 |
| Tabel 4.30 Populasi Unggas Tahun 2016 (Ekor) | 95 |
| Tabel 4.31 Produksi Perikanan, 2016 (ton)..... | 96 |
| Tabel 4.32 Luas HPH dan HTI dalam Wilayah Kecamatan Sesayap Hilir, 2016 | 97 |
| Tabel 4.33 Produksi Batubara menurut Jenis Perijinan Perusahaan, 2014 (M.Ton)..... | 98 |

DAFTAR GRAFIK

| | |
|----------------------------------------------|----|
| Grafik. 1 Perkembangan Jumlah Penduduk | 64 |
|----------------------------------------------|----|



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|-------------------------------------------|------------|
| Lampiran I Dokumen Wawancara | 137 |
| Lampiran II Biodata Penulis..... | 143 |



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Negara kesatuan republik Indonesia memiliki 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota. Upaya pemerintah dalam pencapaian sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan sebagai mana tertuang pada Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menargetkan pemerintah mengentaskan 5000 desa tertinggal dan meningkatkan 2000 desa mandiri pada Tahun 2019.

Di Indonesia pada tahun 2015 mencatat bahwa masih terdapat sekitar 47.045 atau sekitar 63 % Desa yang masuk kategori desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Untuk desa berkembang sekitar 22.882 (31,04 %), desa Maju 3.608 (4,89 %), desa Mandiri 174 (0,24%) dari total jumlah desa di Indonesia sebanyak 73.709 desa, Lebih dari separuhnya berada di kawasan Timur Indonesia.

Tabel 1.1
Daftar Jumlah Status Desa Secara Nasional

| STATUS DESA | JUMLAH DESA | PRESENTASE |
|------------------------|---------------|--------------|
| Desa Sangat Tertinggal | 13.453 | 18,25 % |
| Desa tertinggal | 33.592 | 45,57% |
| Desa berkembang | 22.882 | 31,04 % |
| Desa Maju | 3.608 | 4,89 % |
| Desa Mandiri | 174 | 0,24 % |
| Total | 73.709 | 100 % |

Sumber : Indeks Desa Membangun 2015 (Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi)

Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu provinsi yang termuda di Indonesia, Provinsi Kalimantan Utara terbentuk dari 5 kabupaten/kota yang merupakan wilayah perbatasan dengan Negara Malaysia dan Filipina. Secara Nasional Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Indes Desa Membangun (IDM) tahun 2015, berada diposis ke 32 dari 34 Jumlah Provinsi di Indonesia, Nilai IDM; 0,472.

Sedangkan jumlah desa di Provinsi Kalimantan Utara, jumlah desa berdasarkan kategori yaitu jumlah desa mandiri; 0, jumlah desa maju; 4 (0,89 %), jumlah desa berkembang; 34 (7,61%), jumlah desa tertinggal 119 (26,62%), jumlah desa sangat tertinggal; 290 (64,88%) dari total desa di Kalimantan Utara sebanyak 447 desa. Apa bila digabung desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, Sekitar 407 (91,5 %) Desa yang diupayakan untuk masuk kategori desa berkembang.



Tabel 1.2
Jumlah Desa di Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan IDM 2016

| Provinsi Kalimantan Utara | IDM | Desa Maju | Desa Mandiri | Desa Berkembang | Desa Tertinggal | Desa Sangat tertinggal | Jumlah Desa |
|---------------------------|--------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------|
| Malinau | 0,4699 | 1 | 0 | 5 | 33 | 70 | 109 |
| Bulungan | 0,5287 | 0 | 0 | 12 | 40 | 22 | 74 |
| Tana Tidung | 0,5360 | 1 | 0 | 4 | 18 | 9 | 32 |
| Nunukan | 0,4473 | 2 | 0 | 13 | 28 | 189 | 232 |
| Total Desa | | 4 | 0 | 34 | 119 | 290 | 447 |

Sumber : Indeks Desa Membangun 2016 (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi).

Kabupaten Tana Tidung merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki 5 kecamatan dan 32 Desa, dengan status desa mandiri; 0, jumlah desa maju; 1 (3,13%), jumlah desa berkembang; 4 (12,50%), jumlah desa tertinggal 18 (56,25%), jumlah desa sangat tertinggal; 9 (28,13%). Apabila digabung desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, Sekitar 27 Desa (84,38 %) diupayakan untuk masuk kategori desa berkembang.

Tabel 1.3
Jumlah Status Desa di Kabupaten Tana Tidung Berdasarkan
IDM Tahun 2016

| Kab. Tana Tidung | Desa Maju | Desa Mandiri | Desa Berkembang | Desa Tertinggal | Desa Sangat tertinggal | Jumlah Desa |
|-------------------------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------|
| Kecamatan Sesayap | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| Kecamatan Sesayap Hilir | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| Kecamatan Tana Lia | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Kecamatan Betayau | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Kecamatan Muruk Rian | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Total Desa | 1 | 0 | 4 | 18 | 9 | 32 |

Sumber : Indeks Desa Membangun 2016 (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi).

Upaya pemerintah untuk mengentaskan daerah terpencil dan tertinggal yang ada di Indonesia merupakan wujud dari upaya pemerataan dalam pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh. Sesuai dengan program Nawacita yang salah satunya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah-daerah dan desa.

Perkembangan suatu wilayah tidak dapat berlangsung secara merata, Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor alami (geografis, sumberdaya manusia, sumberdaya alam) maupun faktor buatan manusia (termasuk infrastruktur dan sumberdaya sosial) yang tersebar secara tidak merata dalam wilayah. Kondisi ini selain menimbulkan

ketimpangan dalam pembangunan juga dapat menjadi salah satu penyebab timbulnya daerah tertinggal atau terbelakang.

Daerah tertinggal adalah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional dan berpenduduk relatif tertinggal dari segi ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan. Menurut Bappenas, wilayah tertinggal pada umumnya dicirikan dengan letak geografis yang relatif terpencil atau wilayah yang miskin sumberdaya alam atau rawan bencana, di tegaskan juga pada pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang percepatan pembangunan daerah tertinggal, dijelaskan beberapa ciri-ciri umum daerah tertinggal adalah; tingkat kemiskinan tinggi, kegiatan ekonomi amat terbatas, dan fokus pada sumber daya alam, minimnya sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia rendah. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria:

1. perekonomian masyarakat.
2. sumber daya manusia.
3. sarana dan prasarana.
4. kemampuan keuangan daerah.
5. aksesibilitas; dan
6. karakteristik daerah.

Dalam upaya pembangunan desa terpencil dan percepatan pembangunan tertinggal, erat hubungannya dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa setempat dalam segala bidang, untuk itu

dibutuhkan peran yang cukup besar dari pemerintah daerah, melalui perangkat daerah yaitu pemerintah kecamatan. Hal ini dikarenakan kecamatan merupakan lini yang paling dekat dengan pemerintah desa.

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 32 Desa dengan jumlah setatus Desa Maju sebanyak 1 (satu) desa, Desa Berkembang 4 (empat) desa, Desa Tertinggal sebanyak 18, Desa Sangat Tertinggal 9 (sembilan) desa. Data ini menunjukkan bahwa 84 % desa perlu diperjuangkan. Pemerintah daerah memiliki kesempatan dalam melaksanakan percepatan pembangunan yakni dengan melaksanakan program/kegiatan yang mendukung dan mendorong pembangunan desa terpencil dan percepatan pembangunan desa tertinggal yang ada di Kabupaten Tana Tidung. Hal ini mengingat otonomi daerah adalah sebuah kebijakan yang memberikan wewenang, hak serta kewajiban daerah otonom untuk mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat tanpa campur tangan pihak lain sesuai dengan aturan yang ada. Tujuan pemberian otonomi daerah adalah agar daerah yang mendapatkan hak tersebut dapat mengatur segala urusan termasuk memaksimalkan potensi yang ada di daerah.

Pembangunan meliputi pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh Masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata (Kuncoro 2010:20) Contoh pembangunan fisik adalah Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum. Sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan

memiliki jangka waktu yang lama Contoh dari pembangunan non fisik adalah berupa peningkatan perekonomian rakyat desa, peningkatan kesehatan masyarakat.

Menurut Haeruman (1997:6), ada dua sisi pandang untuk menelaah pedesaan, yaitu: Pembangunan pedesaan dipandang sebagai suatu proses alamiah yang bertumpu pada potensi yang dimiliki dan kemampuan masyarakat desa itu sendiri. Pendekatan ini meminimalkan campur tangan dari luar sehingga perubahan yang diharapkan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang. Sisi yang lain memandang bahwa pembangunan pedesaan sebagai suatu interaksi antar potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa dan dorongan dari luar untuk mempercepat pembangunan pedesaan.

Pembangunan desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Suparno (2001) dalam Priyo Sambodo (2014 :6) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun, pada provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Tana Tidung, Kecamatan Sesayap Hilir disebutkan, dari delapan desa yang ada, dua Desa memiliki status berkembang dan enam desa memiliki status desa tertinggal.

Tabel 1.4
Nama-nama Desa Tertinggal di Kecamatan Sesayap Hilir

| NO | Kecamatan | Kode Desa | Desa | IDM | Status Desa |
|----|---------------|-----------|---------------|--------|-------------|
| 1 | Sesayap Hilir | 65003402 | Sesayap | 0,6320 | Berkembang |
| 2 | Sesayap Hilir | 6500340 | Sesayap Selor | 0,6320 | Berkembang |
| 3 | Sesayap Hilir | 65003403 | Sepala Dalung | 0,5419 | Tertinggal |
| 4 | Sesayap Hilir | 65003401 | Seludau | 0,5515 | Tertinggal |
| 5 | Sesayap Hilir | 65003406 | Sengkong | 0,5016 | Tertinggal |
| 6 | Sesayap Hilir | 65003407 | Menjelutung | 0,4992 | Tertinggal |
| 7 | Sesayap Hilir | 65003404 | Bandan Bikis | 05422 | Tertinggal |
| 8 | Sesayap Hilir | 65003405 | Bebatu | 0,5458 | Tertinggal |

Sumber : Permendes Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa membangun

Banyaknya jumlah desa tertinggal di kecamatan sesayap hilir menunjukkan adanya permasalahan dalam pembangunan desa di kecamatan Sesayap Hilir. Mengingat 1). Kecamatan Sesayap Hilir memiliki potensi alam yang sangat besar, dimana setiap desa terdapat perusahaan-perusahaan swasta baik itu perusahaan Batu bara, Migas dan Perkebunan yang mestinya memberikan dampak yang positif bagi masyarakat desa tersebut. 2). Pemerintah Kabupaten Tana Tidung juga telah mengalokasikan anggaran ADD sebesar 2 Miliar perdesa dari tahun 2010 s/d 2014. Dilanjut lagi dengan anggaran ADD dan DD hingga sampai sekarang 3). Jumlah masyarakat desa di Kecamatan Sesayap Hilir berjumlah sedikit dibandingkan desa yang ada di kabupaten lain yang memiliki kondisi geografi yang hampir sama.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menganggap perlu melakukan penelitian berkenaan kinerja pembangunan desa terpencil dan percepatan pembangunan desa tertinggal di Kecamatan Sesayap Hilir.

B. Perumusan Masalah Penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapatlah dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja pelaksanaan pembangunan desa terpencil ?
2. Bagaimana kinerja percepatan pembangunan desa tertinggal di Kecamatan Sesayap Hilir ?
3. Apa saja kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang yang dimiliki/dihadapinya ?
4. Bagaimana upaya pemerintah Kecamatan Sesayap Hilir menanggulangi hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan pembangaun desa terpencil dan percepatan desa tertinggal?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah;

1. Menganalisis kinerja pelaksanaan pembangunan desa terpencil
2. Menganalisis kinerja percepatan pembangunan desa tertinggal
3. Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang yang dimiliki/dihadapinya

4. Mendiskripsikan upaya pemerintah Kecamatan Sesayap Hilir dalam menanggulangi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan desa terpencil dan percepatan pembangunan desa tertinggal.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat berguna menambah pengetahuan dan wawasan tentang “Kinerja pelaksanaan pembangunan desa terpencil, Kinerja percepatan pembangunan desa tertinggal, Apa saja kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang yang dimiliki/dihadapinya dan upaya pemerintah Kecamatan Sesayap Hilir menanggulangi hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan pembangunan desa terpencil dan percepatan pembangunan desa tertinggal.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat ilmiah: untuk memperkaya khasanah ilmu pemerintahan khususnya Program Magister Administrasi Publik.
2. Manfaat teoritis: Mempelajari daya berlakunya teori secara studi lapangan yaitu melihat keadaan lapangan sesuai dengan teori yang ada dan diharapkan berguna bagi pengembangan, ilmu pengetahuan tentang kinerja pelaksanaan pembangunan desa terpencil dan percepatan pembangunan desa tertinggal di Kecamatan Sesayap Hilir, apa saja kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang yang dimiliki/dihadapinya dan upaya-upaya pemerintah Kecamatan Sesayap Hilir menanggulangi hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan pembangunan desa terpencil dan percepatan pembangunan desa tertinggal.

3. **Manfaat Prkatis** : Berusaha memecahkan masalah yang dihadapi dalam kegiatan peraktek penyelenggaraan pemerintah sehubungan dengan adanya gambaran dari lembaga pemerintah yang lain menyatakan bahwa permasalahan-permasalahan pembangunan desa tertinggal di Kecamatan Sesayap Hilir, dan memberikan masukan kepada instansi terkait baik itu pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, lembaga desa serta masyarakat, khususnya di Kecamatan Sesayap Hilir.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan ini digunakan untuk menelusuri penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah penelitian, sehingga dapat mengetahui masalah mana yang belum diteliti secara mendalam oleh peneliti terdahulu. Selain itu juga sebagai perbandingan antara fenomena yang hendak diteliti dengan hasil studi terdahulu yang serupa.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini pernah dibahas oleh berbagai peneliti antara lain :

1. Penelitian dilakukan oleh Maya Rosalina tahun 2013 Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung dilapangan. Penelitian ini dilakukan di Desa Kuala Lapang dan Desa Taras, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa Kuala Lapang, Kepala Desa Taras. Aparat Desa Kuala Lapang, Aparat Desa Taras serta Tokoh Masyarakat Desa Kuala Lapang dan Masyarakat Desa Taras. Jenis penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif, teknik analisis data model interaktif milik Milles dan Huberman. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Kinerja Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Infrastruktur

mengedepankan aspirasi dan partisipasi masyarakat, yang dapat dilihat dari produktivitas, responsivitas, tanggung jawab dan akuntabilitas pemerintah desa. Untuk mewujudkan pembangunan yang bersifat partisipatif perlu adanya partisipasi masyarakat yang pro aktif untuk mendukung pembangunan di desa.

2. Penelitian dilakukan oleh Elsa Jurnal spasial tahun 2017 dengan judul Strategi Pengembangan Desa Tertinggal di Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Juaya Kabupaten Solok. Nagari Batu Banyak merupakan salah satu desa tertinggal yang ada di Sumatera Barat. Lemahnya potensi fisik dan non fisik desa diduga menjadi pemicu tertinggalnya nagari. Untuk itu tujuan dalam penelitian ini adalah menentukan strategi pengembangan desa tertinggal agar menjadi desa maju. Jenis penelitian kualitatif dengan metode FGD (Focus Group Discussion) yang melibatkan tokoh masyarakat, dan Wali Nagari. Untuk memperkuat data, peneliti juga melakukan observasi dan wawancara dengan masyarakat. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan purposive sampling sedangkan untuk menentukan strategi pengembangan desa menggunakan analisis SWOT (Strengths/kekuatan, Weakness/kelemahan, Opportunities / peluang, dan Threats/ancaman).

Selanjutnya, teknik analisa data melalui reduksi, display, klasifikasi, dan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Nagari Batu Banyak merupakan daerah pertanian dengan tipe persawahan. Belum berkembangnya potensi fisik dan non

fisik. desa menghambat kemajuan nagari. Ini dapat dilihat dari perolehan sumberdaya lahan terbatas, irigasi rusak, dan akses jalan produksi rendah. Sedangkan dari sumberdaya manusia, lembaga sosial, dan lembaga ekonomi masih lemah akibat mental dan budaya instan masyarakat. Oleh sebab itu, strategi pengembangan desa dapat dilakukan dengan meningkatkan dan mengoptimalkan sumberdaya alam melalui pemakaian bibit unggul, memperbaiki irigasi dan akses jalan produksi, memperbaiki cara mengolah pertanian, meningkatkan sumberdaya manusia dengan pelatihan dan penyuluhan, sosialisasi tindakan ekonomi bermoral, meningkatkan ekonomi melalui mata pencarian alternatif, mendirikan lumbung padi nagari, dan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui lembaga sosial.

3. Penelitian dilakukan oleh Jumaidi Husain Irkani Tahun 2012 dengan judul *Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Desa Tertinggal di Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkulu Tahun 2012*, metode yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif, hasil penelitiannya menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu sudah cukup optimal, namun hasilnya masih belum memuaskan, hal ini dikarenakan kurangnya dukungan dan kesadaran masyarakat terhadap pembangunan, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Bengkulu. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu dan hambatan-hambatan yang di hadapi

dalam upaya pembangunan desa tertinggal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis adalah 1. Upaya-upaya yang dilakukan : a. Peningkatan kualitas Pendidikan b. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang ekonomi c. Pemberdayaan Masyarakat d. Pembangunan Infastruktur penghubung e. Meningkatkan kualitas perkebunan. 2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya Pembangunan Desa tertinggal oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis adalah: a. Terbatasnya Sumber dana b. Rendahnya kualitas sumberdaya Manusia c. Kurangnya monitoring dan evaluasi.

Pada penelitian terdahulu menunjukkan: (1) kinerja pemerintahan desa dalam pembangunan infrastruktur mengedepankan aspirasi dan partisipasi; (2) belum berkembangnya potensi fisik dan non fisik desa menghambat kemajuan desa. Strategi pengembangan desa dilakukan dengan meningkatkan dan mengoptimalkan sumberdaya alam, meningkatkan sumberdaya manusia, meningkatkan ekonomi, meningkatkan partisipasi masyarakat. (3) peran pemerintah daerah masih belum memuaskan, hal ini dikarenakan kurangnya dukungan dan kesadaran masyarakat terhadap pembangunan, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Penelitian sekarang ini secara khusus meneliti kearah kinerja pembangunan desa terpencil dan kinerja percepatan pembangunan desa tertinggal dikaji dari teori pembangunan desa, teori pembangunan desa

tertinggal. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2.1
Penelitian yang relevan

| No | Nama/Tahun/Judul Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Rosa Emilia, 2016 kinerja Pemerintahan desa dalam pembangunan Infrastruktur | Diskriptif Kualitatif | Kinerja Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Infrastruktur mengedepankan aspirasi dan partisipasi masyarakat, |
| 2 | Elsa/2017/ Stratrgi Pengembangan Desa Tertinggal di Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok. | Diskriptif Kualitatif | Nagari Batu Banyak merupakan daerah pertanian dengan tipe persawahan. Belum berkembangnya potensi fisik dan non fisik. desa menghambat kemajuan Nagari |
| 3 | Jumaidi Husain Irkami Tahun 2012 dengan judul Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Desa Tertinggal di Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 | Diskriptif Kualitatif | Menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah cukup optimal, hal ini dikarenakan kurangnya dukungan dan kesadaran masyarakat terhadap pembangunan, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Bengkalis. |

B. Konsep Pembangunan Desa

Desa merupakan satuan pemerintah terkecil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang perlu dibina dan ditingkatkan pelayanan administrasi pemerintahannya kearah yang lebih memadai kepada masyarakat desa. Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia mutlak menjadi titik perhatian pemerintah, karena dengan berhasilnya

pembangunan desa berarti sebagian besar penduduk Indonesia turut ditingkatkan kesejahteraannya.

Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Adapun definisi pembangunan desa menurut para ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Kartasasmita (2001:66) inti dari pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri. Manusia merupakan titik pusat dari semua upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan.

The United Nations Development Programme (UNDP) menyatakan bahwa dimensi pembangunan manusia terdiri dari dua aspek pertama peningkatan kemampuan manusia yang terdiri dari peningkatan waktu hidup yang lebih lama dan sehat, peningkatan pengetahuan, serta peningkatan standar kehidupan yang layak. Sedangkan yang kedua adalah penciptaan kondisi yang memungkinkan terjadinya pembangunan manusia yaitu partisipasi dalam politik dan komunitas, kondisi lingkungan dalam jangka panjang, hak dan rasa aman bagi setiap individu, serta terciptanya kesetaraan dan keadilan sosial.

Kuncoro (2010:20) pembangunan fisik misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum. Sedangkan pembangunan non

fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama.

Sudirwo, D (1981:63) Pembangunan desa adalah proses perubahan yang terus menerus dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat beserta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, materi dan sepiritual berdasarkan Pancasila yang berlangsung di desa.

Sasaran pembangunan desa meliputi peningkatan taraf hidup masyarakat desa, penerahan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan penumbuhan kemampuan untuk berkembang secara mandiri yang mengandung makna kemampuan masyarakat untuk dapat mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi serta dapat menyusun perencanaan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah, sehingga dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Makna pembangunan desa adalah pemberdayaan masyarakat dan partisipasi. Partisipasi itu dimaknai tidak saja sebagai keikutsertaan dalam pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak luar desa atau keterlibatan dalam upaya menyukseskan program pembangunan yang masuk ke desanya, akan tetapi lebih dari sekedar itu. Dalam partisipasi yang terpenting adalah bagaimana pembangunan desa itu berjalan atas inisiatif dan prakarsa dari warga setempat, sehingga dalam pelaksanaannya dapat menggunakan pengetahuan yang mereka miliki dan kekuatan sumber daya. Sejalan dengan itu, segala potensi lokal betapapun kecilnya tidak

dapat diabaikan, karena ia akan menjadi sumber dari sebuah pembangunan.

Midgley (1995) dalam Hanny Purnamasari & Rachmat Ramdani, (2018:5) mengemukakan ada beberapa aspek dalam pembangunan desa, diantaranya mementingkan proses dan adanya intervensi. Suatu program pembangunan yang hanya mementingkan hasilnya untuk dipersembahkan pada masyarakat justru mengingkari martabat masyarakat, karena hal tersebut menghambat masyarakat untuk berperan serta dalam proses. Sedangkan intervensi dimaksudkan bahwa dalam pencapaian perubahan sosial dengan pemerataan kesejahteraan bagi semua penduduk tidak terlepas dari campur tangan pemerintah, karena pemerintah yang menguasai berbagai sumber daya. Hal tersebut juga berkaitan dengan penumbuhan keberdayaan mereka dalam program-program pembangunan, apalagi yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sudah sewajarnya didesentralisasikan pada masyarakat setempat untuk direncanakan dan dilaksanakan.

Suparno (2001:46) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat, itusendiri.

Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan pemerintah. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti yang dikemukakan oleh

Ahmadi (2001;222) mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara keduanya.

Secara khusus, Bryant & White (1987:391) dalam Purba, Justina Nuriati (2008; 35) menyikapi pembangunan desa sebagai suatu proses yang mempunyai banyak dimensi permasalahan dan penyelesaiannya tidak bersifat instant. Bahwa pemecahan yang cepat dan tepat bagi pembangunan desa tidak ada, khususnya jika pembangunan dipahami dalam hubungan dengan kapasitas, penumbuhan kekuasaan dalam suatu dunia yang lestari, keadilan, saling bergantung dan berkecukupan. Dalam pengelolaan pembangunan desa harus menghindari dua hal yang sangat merugikan yaitu sikap metode pemecahan yang simplimistik dan pesimistik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa konsep pembangunan desa telah menempatkan perlakuan terhadap masyarakat dalam pembangunan pada posisi yang begitu berarti dan sentral. Menurut Haeruman (1997: 6), ada dua sisi pandang untuk menelaah pedesaan, yaitu: Pembangunan pedesaan dipandang sebagai suatu proses alamiah yang bertumpu pada potensi yang dimiliki dan kemampuan masyarakat desa itu sendiri. Pendekatan ini meminimalkan campur tangan dari luar sehingga perubahan yang diharapkan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang. Sisi yang lain memandang bahwa pembangunan pedesaan sebagai suatu interaksi antar potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa dan dorongan dari luar untuk mempercepat pembangunan pedesaan.

Pembangunan desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pembangunan yang berbasis pedesaan diberlakukan untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan perkembangan antar wilayah, sebagai solusi bagi perubahan sosial, desa sebagai basis perubahan. Dalam realisasinya, pembangunan pedesaan memungkinkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi digerakkan ke pedesaan sehingga desa menjadi tempat yang menarik sebagai tempat tinggal dan mencari penghidupan. Infrastruktur desa, seperti irigasi, sarana dan prasarana transportasi, listrik, telepon, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana-sarana lain yang dibutuhkan, harus bisa disediakan sehingga memungkinkan desa maju dan berkembang.

Skala prioritas pembangunan pedesaan yang berbasis pada pengembangan pedesaan (*rural based development*), meliputi:

- (1) pengembangan ekonomi lokal;
- (2) pemberdayaan masyarakat;
- (3) pembangunan prasarana dan sarana; dan
- (4) pengembangan kelembagaan.

Menurut Syahza&Suarman (2007:127), pembangunan pedesaan harus dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan sifat dan cirinya. Pembangunan pedesaan harus mengikuti empat upaya besar, yang saling berkaitan dan merupakan strategi pokok pembangunan pedesaan, yaitu:

1. Memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Dalam upaya ini diperlukan masukan modal dan bimbingan-bimbingan pemanfaatan teknologi dan pemasaran untuk memampukan dan memandirikan masyarakat desa;
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pedesaan agar memiliki dasar yang memadai untuk meningkatkan dan memperkuat produktivitas dan daya saing;
3. Pembangunan prasarana di pedesaan. Untuk daerah pedesaan prasarana perhubungan merupakan kebutuhan yang mutlak, karena prasarana perhubungan akan memacu ketertinggalan masyarakat pedesaan; dan
4. Membangun kelembagaan pedesaan baik yang bersifat formal maupun nonformal. Kelembagaan yang dibutuhkan oleh pedesaan adalah terciptanya pelayanan yang baik terutama untuk memacu perekonomian pedesaan seperti lembaga keuangan.

C. Pembangunan Desa Terpencil dan Tertinggal

Dalam upaya pembanguana desa terpencil dan percepatan pembangunan desa tertinggal, erat hubunganya dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarat desa dalam segala bidang, yaitu merupakan wujud dari upaya pemerataan dalam pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh.

Desa Terpencil merupakan kawasan perdesaan yang terisolasi dari pusat pertumbuhan/daerah lain akibat tidak memiliki atau kekurangan

sarana (Infrastruktur) perhubungan, sehingga menghambat pertumbuhan/perkembangan kawasan.

Sedangkan kriteria desa terpencil, yaitu:

1. Daerah perdesaan (unit administratif desa)
2. Sarana/ Infrastruktur Aksesibilitas kurang/tidak ada baik seperti jalan dan jembatan
3. Secara Geografis jauh dari pusat pertumbuhan
4. Ada Isolasi Geografis yang memisahkan dari daerah lain

(Margaretta, 2000:20) Salah satu hal yang penting tentang transportasi dengan perkembangan wilayah adalah aksesibilitas. Yang dimaksud aksesibilitas adalah kemampuan atau keadaan suatu wilayah, region untuk dapat diakses oleh pihak luar baik secara langsung atau tidak langsung.

(Adisasmita 2013: 95) dikatakan bahwa salah satu unsur fundamental dalam pembangunan perdesaan adalah jaringan transportasi.

Sedangkan desa tertinggal merupakan kawasan perdesaan yang ketersediaan sarana dan prasarana dasar wilayahnya kurang/tidak ada (tertinggal) sehingga menghambat pertumbuhan/perkembangan kehidupan masyarakatnya dalam bidang ekonomi (kemiskinan) dan bidang pendidikan (keterbelakangan).

kriteria desa tertinggal yaitu:

1. Daerah perdesaan
2. Prasarana dasar wilayah kurang/tidak ada: yaitu air bersih, listrik, dan irigasi
3. Sarana wilayah kurang/tidak ada: sarana ekonomi: seperti (pasar, pertokoan, PKL, industri), Sarana sosial: (Kesehatan dan pendidikan) , Sarana transportasi: (terminal, stasiun, bandara, dll)
4. Perekonomian masyarakat rendah (Miskin/Pra Sejahtera)
5. Tingkat pendidikan rendah (terbelakang/pendidikan kurang dari 9 tahun)
6. Produktivitas masyarakat rendah (Pengangguran pada usia produktif)

Dalam melaksanakan kebijakan pembangunan desa tertinggal, pembangunan desa tertinggal merupakan pembangunan yang dilakukan secara menyeluruh. Dalam melaksanakan pembangunan desa tertinggal, Adisasmita (2006:20) mengingatkan bahwa ada tiga prinsip pokok yang harus diperhatikan, yakni:

- 1) Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan di setiap desa mengacu kepada, pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan Trilogi Pembangunan. Ketiga unsur Trilogi Pembangunan tersebut yaitu a) pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, b) pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, c) stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan di setiap sektor dan antar sektor di setiap

daerah, termasuk desa dan kota, di setiap wilayah dan antar wilayah secara saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu.

- 2) Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan lebih mengandalkan sumber-sumber alam yang terbaharui sebagai sumber pertumbuhan. Disamping itu setiap desa perlu memanfaatkan sumber daya manusia secara luas
- 3) Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijakan deregulasi, debirokratisasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.

Adisasmita (2013:45) menyatakan bahwa sasaran umum dalam pembangunan desa tertinggal dapat dikelompokkan menjadi beberapa sasaran sebagai berikut:

- 1) Tersedianya infrastruktur fisik dan sosial yang mencakup jaringan jalan, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah.
- 2) Terlaksananya pembangunan ekonomi yang mencakup ketersediaan sumber-sumber penghasilan, produktivitas pertanian yang tinggi, dan tingkat efisiensi yang tinggi dalam pemanfaatan sumberdaya alam.
- 3) Terciptanya kelestarian lingkungan yang meliputi terciptanya kesadaran akan arti penting lingkungan, berkembangnya kepedulian lingkungan semua pihak, dan adanya upaya nyata untuk

kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi. Sasaran pembangunan di atas tidak terlepas dari kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh desa tertinggal.

Mengacu pada sasaran tersebut, maka pembangunan pedesaan harus diletakkan dalam konteks: 1) sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan prasarana dan sarana pembangunan untuk memberdayakan masyarakat, Adisasmita (2013:125) Prasarana fisik mempunyai peranan yang sangat penting untuk menunjang berbagai kegiatan ekonomi dan sosial dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan kesejahteraan rakyat. 2) sebagai upaya mempercepat dan memperkuat pembangunan ekonomi daerah dalam arti luas secara efektif dan kokoh serta selalu berlandaskan pada pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian maka program pembangunan perdesaan, pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, mempercepat kemajuan kegiatan ekonomi perdesaan yang berkeadilan, dan mempercepat industrialisasi perdesaan dengan selalu memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Dari beberapa hal yang diuraikan di atas dapat dikatakan bahwa secara umum terdapat dua aspek penting yang menjadi objek dalam pembangunan desa pembangunan, yakni : pertama pembangunan desa dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) di pedesaan seperti jalan desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan dan kesehatan Kedua: pembangunan dalam aspek

pemberdayaan masyarakat, yaitu pembangunan yang objek utamanya aspek pengembangan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan dan memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual, pengembangan kapasitas masyarakat individu maupun kelembagaan yang ada di desa dan sebagainya. Tujuan utamanya adalah untuk membantu masyarakat yang masih tergolong marjinal agar dapat melepaskan diri dari berbagai belenggu keterbelakangan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan desa. Karena proses pembangunan desa bukan hanya sebatas membangun prasarana dan sarana yang diperlukan, tetapi proses pembangunan desa merupakan bagian dari pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat pedesaan

D. Kinerja Pembangunan Desa

Dalam upaya mengkaji kinerja pembangunan desa, maka perlu terlebih dahulu mengkaji maknanya, kinerja pembangunan desa pada dasarnya terdiri dari konsep kinerja dan konsep pembangunan desa, secara sederhana dapat diartikan kinerja pembangunan desa adalah pencapaian hasil pembangunan desa berdasarkan dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan pemerintah.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategi planing suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat

keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan, atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Widodo (dalam Pasolong 2008: 175), mengatakan bahwa Kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.

E. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Pembangunan Desa

1. Faktor- Faktor Penentu Keberhasilan

a) Partisipasi masyarakat

Adisasmita (2013:89) Pendekatan Partisipasi masyarakat adalah mengajak anggota masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program dan proyek, karena mereka dianggap paling mengetahui keadaan lingkungan sosial ekonomi masyarakat, dengan demikian mereka mampu merumuskan solusi mengatasi masalah yang dihadapi, mampu menentukan prioritas program pembangunan. Dengan Partisipasi masyarakat merupakan kontribusi masyarakat secara

nyata dan positif terhadap penyusunan perencanaan dan implementasi pembangunan di desa.

Dalam konteks pembangunan partisipatif, Adisasmita (2006:135-139) menyatakan bahwa indikator keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari 1) tingkat kemampuan dan kemantapan pemerintahan desa; 2) kemampuan kepemimpinan desa dan respon anggota masyarakat yang dipimpin, yakni pemimpin yang persuasif, akomodatif, dinamis dan antisipatif; 3) keikutsertaan masyarakat dalam setiap tahap proses pembangunan; 4) bentuk kontribusi anggota masyarakat pembangunan; dan 5) partisipasi dalam hubungannya dengan desa lain yang terkait dengan pembangunan bersama. Indikator-indikator di atas sangat mumpuni untuk melihat keberhasilan dalam pembangunan perdesaan, terutam desa yang masih tertinggal, karena dengan kompleksitas permasalahan yang oleh desa tertinggal memudahkan dalam melakukan pengukuran dan melihat keberhasilan program pembangunan di desa tersebut.

b) Alokasi dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)

Dukungan dana dari pemerintah daerah dan Pusat yang diberikan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada

Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa. Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa. Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. Dimana Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali. Berdasarkan Peraturan Bupati Nmor 73 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa, adapun tujuan dari ADD adalah: a) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; b) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat; c) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan; d) Meningkatkan

pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; e) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; f) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; g) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; h) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). (Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa)

c) Sumber Daya Manusia (SDM).

Sinungan (1987) mengatakan bahwa sumber daya manusia adalah memanfaatkan potensi manusia itu sendiri dalam melakukan pekerjaan dengan baik dan dengan tingkat keterampilan yang sesuai dengan isi kerja yang akan mendorong kemajuan yang akan meningkatkan pendapatan dan pencapaian tujuan dilaksanakan dengan baik, efektif dan efisien.

Kondisi pendidikan masyarakat akan berhubungan erat terhadap kualitas pola pikir masyarakat di dalam mengolah sumber-sumber pendapatan yang ada didaerahnya, tanpa adanya penguasaan teknologi, dan kinerja pemerintah desa yang memiliki kapabilitas, Kredibilitas dan responsibilitas yang memadai.

d) Faktor Alam (SDA)

Keadaan desa yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas dan memadai sangat mempengaruhi program pembangunan, Keadaan lingkungan yang hampir terdiri dari sedikit wilayah teritorial hutan dan pepohonan kayu, Menjadikan program pembangunan semakin menjadi maju dan terarah.

e) Lembaga Desa

Lembaga desa merupakan pedoman bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup. Menurut Anwar Sitepu (2011:1) dalam Elsa (2017:71) strategi yang dilakukan dalam pengembangan desa tertinggal adalah dengan penguatan lembaga desa yang berfungsi sebagai wadah agar masyarakat berpartisipasi dalam memberikan kontribusinya terhadap daerah tempat mereka tinggal. Dalam kegiatan ini masyarakat harus aktif dan berpartisipasi dalam program-program lembaga desa sehingga terjadinya transparansi antara masyarakat dan pemerintah. Di desa lembaga desa yang ada belum difungsikan dengan baik, padahal lembaga ini merupakan motor penggerak dan penerima aspirasi masyarakat sehingga dapat mendorong perkembangan masyarakat ke arah yang lebih baik. Lembaga desa yang ada di desa banyak adalah lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), badan pemberdayaan desa (BPD), lembaga

swadaya masyarakat (LSM), pendidikan kesejahteraan keluarga (PKK), dan karang taruna. Walaupun lembaga sosial banyak namun tidak berfungsi sesuai tugas masing-masing. Lembaga sosial tidak mampu mengcover masyarakat sesuai cita-cita bersama. Hal ini mengakibatkan masyarakat berdiri sendiri-sendiri dan tidak ada alat untuk menyatukan mereka. Sosialisasi yang kurang tentang lembaga sosial membuat masyarakat memiliki pengetahuan yang minim terhadap fungsi dan perannya. Padahal dengan berfungsinya lembaga sosial dapat membentuk sikap dan mental masyarakat yang lebih terbuka sehingga mau menerima perubahan-perubahan yang ada.

f) Budaya

Menurut Koentjaraningrat (2005:94), dalam Elsa (2017 : 61) kebudayaan merupakan pola-pola gagasan/ide, tindakan, dan hasil kelakuan yang dimantapkan oleh berbagai sistem nilai dan norma. Di dalam kebudayaan terdapat komponen-komponen yang harus diperhatikan yaitu sistem budaya dan sistem sosial, sistem kepribadian (sikap seseorang), dan sistem organisme (pelengkap bagi seluruh kerangka yang melibatkan proses biologi serta bikimia yang terdapat dalam diri manusia).

Kebudayaan mengandung sistem nilai budaya yaitu adat istiadat yang merupakan pedoman atau orientasi masyarakat dalam kehidupan. Masyarakat masih mempertahankan adat

istiadat yang bersifat mengikat. Masyarakat juga memiliki pengetahuan yang minim serta wawasan yang sempit. Hal ini mempengaruhi pola pikir masyarakat yang sulit dalam menerima perubahan-perubahan dari luar. Selain itu, lemahnya hubungan sosial masyarakat mengakibatkan masyarakat berlomba-lomba membeli barang tanpa memperhatikan kebutuhan. Sikap masyarakat yang bersifat konsumtif mengakibatkan masyarakat semakin terpuruk dalam kemiskinan sehingga jalan satu-satunya adalah bergantung pada sumberdaya alam.

g) Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah adalah suatu keputusan pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum. Dalam upaya pembangunan desa terpencil dan percepatan desa tertinggal tidak dapat di laksanakan oleh satu pihak saja melainkan semua unsur mesti dilibatkan, oleh karena itu perlu disusun suatu kebijakan pembangunan yang saling mendukung sesuai dengan potensi sumber daya alam seperti pengembangan pariwisata dan pembangunan sarana dan prasarana, yang dilakukan oleh sektor swasta dan pemerintah. Dari sudut inilah terdapat keterkaitan erat antara pemerintah selaku fasilitator, motivator dan mediator dengan sektor swasta sebagai pelaku pembangunan. Dengan melihat keterkaitan

tersebut, kebijakan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga lebih berkualitas dan produktif. Peran serta masyarakat didorong dengan terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara sinergi dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

2. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Desa

Adisasmita (2013:83) salah satu teknik analisis pembangunan daerah pedesaan adalah Analisa SWOT. Teori SWOT (*Strengths-Weaknesses- Opportunities- Threats*) menurut Wheelen dan Hunger (2012) dalam Andarurahutimo (2016; 22) Teori SWOT merupakan sebuah langkah untuk dapat mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Lingkungan eksternal berisi variabel peluang dan ancaman (*opportunities and threats*) yang berada di luar organisasi dan bukan merupakan hal yang dapat dikontrol oleh pimpinan organisasi dalam jangka waktu dekat. Lingkungan internal organisasi terdiri dari variabel kekuatan dan kelemahan (*strenghts and weaknesses*) yang berada dalam tubuh organisasi itu sendiri dan biasanya tidak dalam kontrol pimpinan organisasi dalam waktu dekat. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu:

a. Faktor Hambatan (Kelemahan, Ancaman)

Faktor yang menjadi hambatan pembangunan pedesaan adalah masalah ketidak beruntungan komperatif yang disebabkan oleh: (1) ketertinggalan pembangunan infrastruktur, mengakibatkan keterbatasan masyarakat pedesaan dalam akses komunikasi, informasi, produk, dan; (2) keterbatasan kemampuan dan sumber daya, mengakibatkan keterbatasan masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa yang berdaya saing untuk dipasarkan ke pasar yang lebih luas, (3) keterbatasan administrasi publik, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial, politik dan masyarakat madani, mengakibatkan keterbatasan masyarakat pedesaan dalam akses kebijakan, perekonomian, keuangan, sosial, dan politik (arsyad dkk 2011).

b. Faktor Pendukung (Kekuatan, Peluang)

Pembangunan desa merupakan upaya terencana dalam kesinambungan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang pemerintah desa.

Faktor pendukung pembangunan desa adalah adanya dasar hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang pemerintah desa, di antaranya;

1. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial (pasal 78 UU Nomor 6 Tahun 2014)
2. Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat kegotongroyongan, memanfaatkan kearifan lokal, dan sumber daya alam sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pembangunan lokal bersekala desa dilaksanakan sendiri oleh desa (pasal 81 UU Nomor 6 Tahun 2014)
3. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, dan berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. masyarakat melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (pasal 82 UU Nomor 6 Tahun 2014).

F. Kerangka Pikir Penelitian

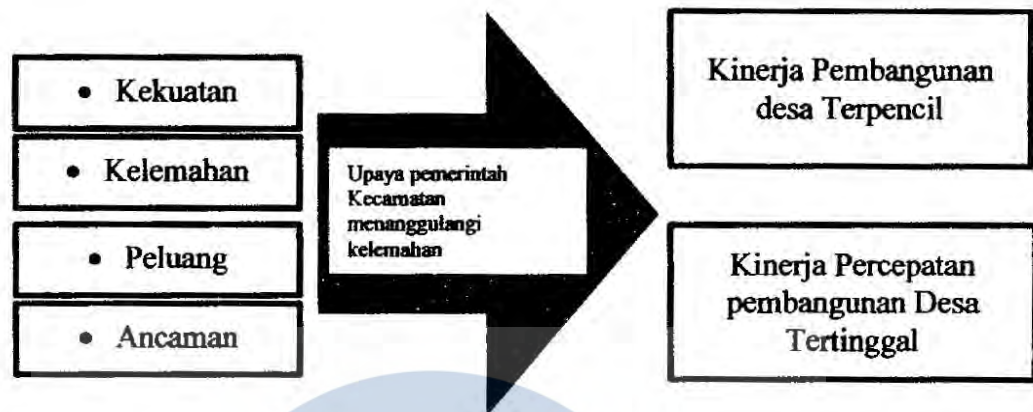
Salah satu program prioritas Pemerintah Indonesia adalah membangun dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah-daerah dan desa. bentuk dukungan pemerintah yaitu diterbitkannya Undang-undang

Nomor 06 Tahun 2014 tentang pemerintah desa sebagai dasar hukum dalam melaksanakan pembangunan pedesaan, kementriaan yang khusus menangani percepatan pembangunan daerah terpencil dan tertinggal. Dalam perakteknya program-program dan proyek pembanguna di desa dalam percepatan pembangunan desa dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui kementrian, pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota, pemerintah Kecamatan, pemerintah Desa, dan pihak swasta. Banyaknya program-program dan proyek pembanguna di desa yang dikucurkan merupakan wujud dari pembangunan desa.

Kinerja pembangunan desa terpencil dan percepatan pembangunan desa tertinggal adalah pencapaian hasil pembangunan desa berdasarkan dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan pemerintah di kawasan perdesaan yang terisolasi dari pusat pertumbuhan/daerah akibat tidak memiliki atau kekurangan sarana (Infrastruktur) perhubungan, dan ketersediaan sarana dan prasarana dasar wilayahnya kurang/ tidak ada (tertinggal) sehingga menghambat pertumbuhan/perkembangan kehidupan masyarakatnya dalam bidang ekonomi (kemiskinan) dan bidang pendidikan (keterbelakangan).

Kajian penelitian ini menggambarkan kinerja pembangunan desa terpencil dan percepatan pembangunan desa tertinggal, terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan desa seperti kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Serta upaya pemerintah kecamatan Sesayap Hilir dalam menanggulangi kelemahan dalam pembangunan desa.

Gambar 2.1 Kerangka pikir penelitian



G. Definisi Konseptual dan Oprasional

1. Kinerja pembangunan desa terpencil adalah pencapaian hasil pembangunan desa berdasarkan dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan pemerintah di kawasan perdesaan yang terisolasi dari pusat pertumbuhan/daerah lain akibat tidak memiliki atau kekurangan sarana (Infrastruktur) perhubungan, sehingga menghambat pertumbuhan/ perkembangan kawasan. Indikator kinerja pembangunan desa terpencil yaitu; Tersedianya Aksesbillitas yaitu jalan dan jembatan
2. Kinerja percepatan pembangunan desa tertinggal adalah pencapaian hasil pembangunan desa dengan melakukan percepatan pembanguana berdasarkan dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan pemerintah dikawasan perdesaan yang ketersediaan sarana dan prasarana dasar wilayahnya kurang/ tidak ada (tertinggal) sehingga

menghambat pertumbuhan/perkembangan kehidupan masyarakatnya dalam bidang ekonomi (kemiskinan) dan bidang pendidikan (keterbelakangan).

Indikator kinerja percepatan pembangunan desa tertinggal;

- a) Tersedianya infrastruktur fisik dan sosial yang mencakup yaitu terpenuhinya sarana dasar (Air bersih, Listrik), tersedianya sarana ekonomi (pasar, industri, dll), tersedianya sarana sosial (kesehatan dan pendidikan), tersedianya sarana dan prasarana transportasi (terminal, stasiun, bandara) yang tersebar di seluruh wilayah.
 - b) Terlaksananya pembangunan ekonomi.
 - c) Terciptanya kelestarian lingkungan yang meliputi terciptanya kesadaran akan arti pentingnya lingkungan, berkembangnya kepedulian lingkungan semua pihak, dan adanya upaya nyata untuk kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi.
3. Kekuatan yaitu situasi ataupun kondisi yang merupakan gambaran kekuatan dari suatu organisasi yang bisa memberikan pengaruh positif dalam melakukan pembangunan desa pada saat ini ataupun masa yang akan datang.
 4. Kelemahan yaitu situasi ataupun kondisi yang merupakan gambaran kelemahan/hambatan dari suatu organisasi/pemerintah yang bisa memberikan pengaruh negatif dalam melakukan pembangunan desa pada saat ini.

5. Peluang/dukungan yaitu situasi ataupun kondisi yang merupakan gambaran dukungan dari sisi luar suatu organisasi/pemerintah dalam melakukan pembangunan desa.
6. Ancaman/tantangan yaitu situasi ataupun kondisi yang merupakan gambaran ancaman dari suatu organisasi dalam melakukan pembangunan desa.
7. Upaya Kecamatan Sesayap Hilir adalah merupakan tindakan yang diambil oleh Kecamatan Sesayap Hilir berkenaan dengan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan desa terpencil dan percepatan pembangunan desa tertinggal



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah, maka adanya keteraturan jalan pemikiran agar kemampuan berpikir itu tertata pada suatu jalur yang baik, maka dibutuhkan suatu metodologi. Menurut W. J. S Poerwadarminta (1993: 649), menjelaskan bahwa metode adalah cara yang teratur dapat terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Jadi pada dasarnya dalam menguraikan suatu maksud tertentu, perlu ada cara atau jalan yang jelas dan teratur, terarah melalui daya pikir yang logis juga. Berangkat dari rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2001:17) penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan pada objek yang diteliti. Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif. Dimana peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan dinyatakan.

B. Sumber Informasi

Untuk mendapatkan data dan informasi dilakukan dengan wawancara mendalam kepada aktor-aktor yang terlibat di dalam pemerintahan daerah. Informan dipilih berdasarkan penarikan sampel nonprobability yaitu dengan cara purposive sampling, teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Untuk itu dibutuhkan key person atau informan kunci sebagai titik tolak mendapatkan informasi

tentang permasalahan penelitian. Yaitu Pemerintah Kecamatan/Camat, Aparatur kecamatan, Kepala desa, ketua BPD Desa, Tokoh Masyarakat.

Pemerintah Kecamatan yaitu; 1 Orang Camat, dan 3 Orang Kepala Seksi, Untuk Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan sebanyak 8 Orang dari delapan desa, Ketua Lembaga Desa (BPD) berjumlah 8 orang dari delapan desa dan 8 Orang Dari Tokoh Masyarakat pada masing-masing desa. Total Keseluruhan 28 Orang.

Informan yang saya ambil dari pihak kecamatan maupun desa sebanyak 28 Orang dengan pertimbangan bahwa mereka sebagai pemimpin/pelaku dalam penyelenggaraan pemerintahan, tentunya pemimpin dan tokoh masyarakat memiliki informasi yang lengkap, akurat dan aktual.

Tabel 3.1
Sumber Informasi Penelitian

| No | Informan | Keterangan |
|----|------------------------------------------|--------------------|
| 1 | Camat/Sekretaris Camat | Informan Pendukung |
| 2 | Kasi Tata Pemerintahan | Informan Pendukung |
| 3 | Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa | Informan Pendukung |
| 4 | Kasi Kesejahteraan Sosala dan Pendapatan | Informan Pendukung |
| 5 | Kepala Desa | Informan Pendukung |
| 6 | Ketua BPD | Informan Pendukung |
| 7 | Tokoh Masayaakat Desa | Informan Pendukung |

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai instrumen utama, sebagai instrumen utama karena peneliti berfungsi dalam menetapkan penelitian, menentukan subyek penelitian, menganalisis data, menilai kualitas data melakukan pengumpulan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Peneliti memilih subjek penelitian untuk memperoleh data di lapangan, melakukan observasi, bergaul, mengamati, partisipasi langsung ke lapangan, dan bersosialisasi dengan mereka. Dengan demikian peneliti menjadi alat utama dalam penelitian kualitatif. penelitian kualitatif memandang bahwa realisasi itu holistik dan dinamis sehingga segala sesuatunya belum memiliki bentuk yang pasti. Dalam keadaan demikian tidak ada pilihan lain hanya peneliti itu sendiri sebagai alat mencapainya.

Untuk melengkapi alat perolehan data maka akan digunakan beberapa instrumen lain seperti; pedoman observasi, pedoman wawancara, catatan lapangan.

1. Pedoman wawancara adalah pedoman yang ditujukan pada subjek penelitian yang bersisi unsur-unsur perspektif psikologi dan sosiologi. Pedoman wawancara berisi petunjuk-petunjuk wawancara kepada subjek yang berfungsi untuk mengarahkan wawancara agar tidak keluar dari konteks dan fokus penelitian.
2. Pedoman Observasi adalah digunakan sebagai alat bantu dalam mengamati data yang tidak sempat direkam melalui wawancara. Pedoman tersebut berisi petunjuk-petunjuk yang membantu peneliti agar hasil wawancara dapat dimaknai

dengan benar dengan memperhatikan ekspresi, suasana kegiatan, kondisi internal subjek penelitian.

3. Catatan Lapangan, melakukan catatan yang ditemukan dilapangan setelah melakukan observasi dilapangan.

D. Prosedur Pengumpulan Data

1. Wawancara dan Interview adalah mewawancarai langsung informen di lokasi penelitian. Menurut Meleong (2000:150) menjelaskan wawancara dan interview adalah percakapan terbuka antara pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
2. Observasi, atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan bisa dilakukan secara terlibat (partisipasi) maupun non partisipasi. (Idrus, 2009:01) dalam pengamatan ini, peneliti merakam/mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semi terstruktur (misalnya dengan mengajukan pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti)
3. Dokumentasi, Peneliti akan mengumpulkan data melalui studi Perpustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Metode Analisa Data

Analisis data kualitatif dapat didefinisikan dengan penelitian dengan analisis data yang lebih mengandalkan aspek semantik dan kata-kata yang berasal dari sumber informasi utama (key informan). Analisis data kualitatif biasanya digunakan untuk penelitian pada domain keilmuan yang belum atau tidak ada. Milles dan Hubermas dalam Silalahi (2009:339) menyatakan bahwa “kegiatan analisis terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi”.

1. Reduksi Data ; Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan melakukan reduksi data berlangsung secara terus menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi (membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi dan menulis memo).
2. Penyajian Data; Penyajian data yaitu mengumpulkan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, kita melihat akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis atau

mengambil tindakan-berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut.

3. Menarik kesimpulan yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi -konfigursi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Mula-mula kesimpulan belum jelas, tetapi kemudian kian meningkat menjadi lebih terperinci



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kecamatan Sesayap Hilir

a. Karakteristik Umum

Kecamatan Sesayap Hilir terbentuk pada tahun 2002 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13 tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Tanjung Palas Barat, Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas Timur, Tanjung Selor, Tanjung Palas Tengah, Sesayap Hilir, Tanah Lia Dan Kecamatan Peso Hilir Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan daerah Kabupaten Bulungan maka pada tahun 2007 wilayah Sesayap Hilir masuk kedalam wilayah Kabupaten Tana Tidung yang merupakan pemekaran Kabupaten Bulungan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur, wilayah Kabupaten Tana Tidung berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bulungan yang terdiri atas cakupan wilayah Kecamatan Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir, Kecamatan Tana Lia. Secara administratif Kecamatan Sesayap Hilir dibagi menjadi 8 (delapan) desa yang terdiri dari Desa Sesayap, Desa Sengkong, Desa Bebatu, Desa Bandan Bikis, Desa Sepala Dalung, Desa Seludau, Desa Menjelutung dan Desa Sesayap Selor.

Letak dan Batas Wilayah Kecamatan Sesayap Hilir yaitu

Utara : Kabupaten Nunukan

Timur : Kecamatan Bunyu dan Kota Tarakan

Selatan : Kecamatan Sesayap, Kecamatan Betayau dan Kecamatan
Sekatak

Barat : Kecamatan Sesayap

b. Topografi

Kondisi wilayah atau lebih umum disebut topografi wilayah Sesayap Hilir merupakan wilayah yang berada di sepanjang daerah aliran sungai Sesayap (576 km) dan semua desa merupakan daerah dataran rendah. Sungai Sesayap mengalir dari Kabupaten Malinau, Kecamatan Sesayap, kemudian mengalir ke arah Timur yaitu wilayah Kecamatan Sesayap Hilir, dan bermuara ke laut Tarakan. Bagian Utara Kecamatan Sesayap Hilir merupakan wilayah perusahaan perkebunan Kelapa sawit.

Kondisi Kecamatan Sesayap Hilir memiliki beberapa pulau, yang dialiri beberapa sungai besar dan kecil, serta secara topografi memiliki daratan yang tidak berbukit-bukit, tidak bergunung-gunung sehingga tidak memiliki tebing terjal dan kemiringan yang tidak tajam.

Tabel 4.1
Nama dan Luas Pulau

| No | Pulau | Luas Pulau (Ha) |
|-----|-------------------------|-----------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Pulau Fani | 276,1700 |
| 2. | Pulau Sumbing | 48,1000 |
| 3. | Pulau Siambun | 36,1450 |
| 4. | Pulau Rantalian | 77,3890 |
| 5. | Pulau Bengkalung | 24,9770 |
| 6. | Pulau Kranggan | 192,6840 |
| 7. | Pulau Mangkudulis Besar | 6 444,4760 |
| 8. | Pulau Mangkudulis Kecil | 3 976,6560 |
| 9. | Pulau Sapunti | 148,9900 |
| 10. | Pulau Tiga | 523,7300 |
| 11. | Pulau Sesayap | 129,8360 |
| 12. | Pulau Selamba | 89,5640 |
| 13. | Pulau Baru | 78,8320 |
| 14. | Pulau Tembalang | 229,2530 |
| 15. | Pulau Sepakang | 17,3210 |
| 16. | Pulau Sekapal | 100,9890 |
| 17. | Pulau Belanak | 78,1100 |
| 18. | Pulau Sengato | 3.423,6620 |
| 19. | Pulau Ijab | 2.871,8040 |
| 20. | Pulau Mengkasak | 7,3000 |
| 21. | Pulau Lemangu | 28,4000 |
| 22. | Pulau Kepiting | 105,4745 |
| 23. | Pulau Tipus | 11,6000 |

(Sumber : Profil Kecamatan Tahun 2017)

Adapun pulau yang terluas adalah Pulau Mangkudulis Besar (6 444,4760 ha) dan sungai yang terpanjang adalah Sungai Sesayap (576 km). Terdapat paling tidak 101 pulau-pulau yang sudah mempunyai nama di wilayah Kecamatan Sesayap Hilir. tabel

di atas hanya sebanyak 23 pulau dengan jumlah luas 18.921,4625 Ha.

Desa-desanya Kecamatan Sesayap Hilir berada pada ketinggian 8 - 10 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan topografinya daerah ini berada di wilayah dataran rendah. Menurut kemiringan/kelerengan tanah, wilayah Kecamatan Sesayap Hilir terletak pada lahan yang datar, dengan sekitar 57,72 % lahan berada pada kemiringan di bawah 15%.

Tabel 4.2
Ketinggian Desa Dari Permukaan Laut Menurut Lokasi Pengukuran,

| Desa | Ketinggian | Lokasi Pengukuran |
|------------------|------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. Sesayap | 19 | Kantor Camat |
| 2. Sengkong | 8 | Kantor Desa |
| 3. Bebatu | 10 | Kantor Desa |
| 4. Bandan Bikis | 10 | Kantor Desa |
| 5. Sepala Dalung | 13 | Kantor Desa |
| 6. Seludau | 20 | Kantor Desa |
| 7. Menjelutung | 16 | Kantor Desa |
| 8. Sesayap Selor | 20 | Kantor Desa |

Berdasarkan penggunaan lahan, wilayah Sesayap Hilir merupakan areal pertanian yang sangat produktif, hampir 60% merupakan lahan pertanian non sawah.

Tabel 4.3
Jenis Penggunaan Lahan Tahun 2016

| No | Penggunaan Lahan | Luas |
|-------|-----------------------------------------------|---------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Lahan Pertanian | 93 894 |
| 1.1. | Lahan Sawah | 983 |
| | a. Irigasi teknis | - |
| | b. Irigasi setengah teknis | - |
| | c. Irigasi sederhana | 65 |
| | d. Irigasi desa/non PU | - |
| | e. Tadah hujan | 705 |
| | f. Pasang surut | 213 |
| | g. Lebak | - |
| | h. Lainnya (polder, rembesan, dll) | - |
| 1.2. | Lahan Bukan Sawah | 92 911 |
| | a. Tegak/kebun | 282 |
| | b. Ladang/huma | 100 |
| | c. Perkebunan | 54 830 |
| | d. Ditanami pohon/hutan rakyat | - |
| | e. Padang penggembalaan/rumput | 25 |
| | f. Sementara tidak diusahakan **) | 200 |
| | g. Lainnya (kolam, Tambak, hutan negara, dll) | 37 474 |
| 2 | LAHAN BUKAN PERTANIAN | 37 859 |
| Total | | 131 753 |

c. Iklim

Dalam pengertian iklim terdapat unsur-unsur iklim, iklim darat dan iklim laut, dan klasifikasi iklim yakni iklim matahari dan iklim fisik. Dalam pengertian iklim menurut definisi para ahli mengatakan bahwa pengertian iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu daerah yang luas dan ditentukan berdasarkan perhitungan dalam waktu yang lama (kurang lebih 30 tahun).

Unsur-unsur iklim sama dengan unsur-unsur cuaca. Unsur-unsur iklim terbagi atas 6 unsur yakni suhu udara, tekanan udara, kelembapan udara, awan, angin, hujan, ke enam unsur tersebut sama dengan unsur-unsur cuaca

Proses pergantian panas dan uap air antara bumi dan atmosfer dalam jangka waktu yang lama menghasilkan suatu keadaan yang dinamakan iklim. Iklim tidak berarti rata-rata secara statistik tetapi merupakan suatu kumpulan dari kondisi atmosfer yang meliputi panas, kelembapan dan gerakan udara.

Tabel 4.4
Rata-rata Suhu Udara, Kelembaban,
Tekanan Udara, Kecepatan Angin,

| Rincian | Satuan | Nilai |
|----------------------------|-----------------|----------|
| (1) | (2) | (3) |
| Suhu Udara | | |
| Rata-Rata | (°C) | 27,75 |
| Minimum | (°C) | 23,70 |
| Maksimum | (°C) | 34,00 |
| Kelembaban Udara | | |
| Rata-Rata | % | 83,75 |
| Minimum | % | 81,00 |
| Maksimum | % | 86,00 |
| Tekanan Udara | Milibar (mb) | 1 009,83 |
| Curah Hujan | mm ³ | 3 598,10 |
| Kecepatan Angin | Knot | 4,17 |
| Penyinaran Matahari | % | 55,75 |

Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan di Kabupaten Tana Tidung, 2016 Iklim adalah suatu unsur penting dalam kehidupan, bahkan jika ditinjau dari teori terjadinya bumi maka iklim telah ada sebelum makhluk hidup atau kehidupan itu ada. Cuaca adalah keadaan atmosfer pada suatu saat atau keadaan dari hari ke hari dalam waktu singkat (pendek) berubah keadaannya yaitu panasnya, kelembabannya dan gerakan udaranya. Cuaca pada dasarnya dihasilkan oleh suatu proses yang berusaha menyamakan perbedaan-perbedaan keadaan dari suatu jaringan energi radiasi yang diterima dari matahari. Data iklim yang disajikan berasal dari Stasiun Meteorologi Tanjung Selor. Hal ini dikarenakan di Kabupaten Tana Tidung belum terdapat stasiun meteorologi yang memberikan informasi klimatologi.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Stasiun Meteorologi Tanjung Selor pada tahun 2016 mengalami musim hujan sepanjang tahun dengan curah hujan 3.598,1 mm³. Untuk penyinaran matahari rata-rata 55,75 persen. Rata-rata suhu udara sepanjang tahun 2016 adalah berkisar antara 23,7 - 34°C. Untuk kelembaban udara tercatat relatif tinggi berkisar antara 81 persen sampai dengan 86 persen dengan rata-rata selama tahun 2016 adalah 83,75 persen.

d. Pemerintahan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13 tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Tanjung Palas Barat, Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas Timur, Tanjung Selor, Tanjung Palas Tengah, Sesayap Hilir, Tanah Lia Dan Kecamatan Peso Hilir Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan. Wilayah Kabupaten Tana Tidung berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bulungan yang terdiri atas cakupan wilayah Desa Sesayap, Desa Sengkong, Desa Bebatu, Desa Bandan Bikis, Desa Sepala Dalung, Desa Seludau dan Desa Menjelutung.

Berikut merupakan visi dan misi Kecamatan Sesayap Hilir

Visi

Mewujudkan Kecamatan Sesayap Hilir yang terunggul dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat .

Misi

- 1. Mengembangkan kualitas Kehidupan Sosial, Budaya dan Ekonomi masyarakat yang layak dan bermartabat;**
- 2. Mengembangkan kegiatan keagamaan di Kecamatan Sesayap Hilir;**
- 3. Peningkatan kualitas SDM yang bermutu dan berdaya saing tinggi;**

4. Peningkatan Profesionalisme aparat yang kreatif, inovatif dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
5. Peningkatan prasarana dan sarana pelayanan, guna efisiensi dan efektifitas pelayanan publik;
6. Peningkatan infrastruktur pedesaan;
7. Meningkatkan kemampuan kapasitas kelembagaan masyarakat.

Tabel 4.5
Desa dan Luas Wilayah Masing-masingnya, 2016

| Desa | Luas Wilayah | | Banyaknya RT |
|------------------|-----------------|-------|--------------|
| | Km ² | % | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. Sesayap | 362,17 | 27,49 | 6 |
| 2. Sengkong | 118,39 | 8,99 | 2 |
| 3. Bebatu | 276,62 | 21,00 | 4 |
| 4. Bandan Bikis | 171,89 | 13,05 | 4 |
| 5. Sepala Dalung | 168,79 | 12,81 | 5 |
| 6. Seludau | 121,26 | 9,20 | 3 |
| 7. Menjelutung | 98,41 | 7,47 | 4 |
| 8. Sesayap Selor | *) | *) | 3 |

Kecamatan Sesayap Hilir memiliki 8 desa, yang terdiri dari 31 RT. Dengan luas Sesayap 362,17 Km² jumlah RT 6, Desa Sengkong luas daerah 118,39 Km² jumlah RT 2, Desa Bebatu luas Desa 276,62 jumlah RT 4, Bandan Bikis luas desa 171,89 Km² Jumlah RT 4, Sepala Dalung Luas Desa 168,79 Km², Jumlah RT

5 , Menjelutung Luas Desa 98,41 Km² Jumlah RT 4 , Sesayap Selor belum di ketahui, jumlah RT 3.

Selain kepala desa, di desa juga terdapat aparatur desa yang membantu kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa, Sekretaris Desa, KAUR dan Staf lainnya. Khusus untuk Sekretaris Desa, ada beberapa orang yang sudah berstatus PNS diantaranya Sekretaris Desa Sengkong dan Sekretaris Desa Bandan Bikis.

Tabel 4.6
Banyaknya Kaur, Bendahara dan Staff Desa menurut Desa 2016

| Desa | KAUR | Bendahara | STAF |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. Sesayap | 6 | 1 | 11 |
| 2. Sengkong | 5 | 1 | 9 |
| 3. Bebatu | 6 | 1 | 7 |
| 4. Bandan Bikis | 6 | 1 | 8 |
| 5. Sepala Dalung | 6 | 1 | 11 |
| 6. Seludau | 6 | 1 | 7 |
| 7. Menjelutung | 7 | 1 | 7 |
| 8. Sesayap Selor | 6 | 2 | 3 |
| Jumlah | 48 | 9 | 63 |

Selain itu juga terdapat LPM dan BPD. Dalam struktur organisasi desa di kecamatan Sesayap Hilir terdapat Bendahara,

Tabel 4.7
Banyaknya BPD dan LPM menurut Desa, 2016

| Desa | BPD | | LPM | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan |
| (1) | | (2) | (3) | (4) |
| 1. Sesayap | 4 | 1 | 5 | - |
| 2. Sengkong | 4 | 1 | 3 | - |
| 3. Bebatu | 5 | - | 5 | - |
| 4. Bandan Bikis | 5 | - | 5 | - |
| 5. Sepala Dalung | 5 | - | 5 | - |
| 6. Seludau | 5 | - | 5 | - |
| 7. Menjelutung | 4 | - | 5 | - |
| 8. Sesayap Selor | 4 | 1 | 3 | 2 |
| Jumlah | 36 | 3 | 36 | 2 |

Untuk klasifikasi desa menurut kecamatan hingga saat ini masih menggunakan data tahun 2016 yaitu untuk klasifikasi desa Maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal.

Tabel 4.8
Klasifikasi Desa menurut Kementrian, 2016

| NO | Kecamatan | Kode Desa | Desa | IDM | Status Desa |
|----|---------------|-----------|---------------|--------|-------------|
| 1 | Sesayap Hilir | 65003402 | Sesayap | 0,6320 | Berkembang |
| 2 | Sesayap Hilir | 6500340 | Sesayap Selor | 0,6320 | Berkembang |
| 3 | Sesayap Hilir | 65003403 | Sepala Dalung | 0,5419 | Tertinggal |
| 4 | Sesayap Hilir | 65003401 | Seludau | 0,5515 | Tertinggal |
| 5 | Sesayap Hilir | 65003406 | Sengkong | 0,5016 | Tertinggal |
| 6 | Sesayap Hilir | 65003407 | Menjelutung | 0,4992 | Tertinggal |
| 7 | Sesayap Hilir | 65003404 | Bandan Bikis | 05422 | Tertinggal |
| 8 | Sesayap Hilir | 65003405 | Bebatu | 0,5458 | Tertinggal |

e. Aparatur Pemerintah Daerah

Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara sebagai abdi masyarakat atau pelayan publik, Sedangkan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan sumber daya manusia yang memadai. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki diharapkan memunculkan ASN yang kompeten dan memiliki integritas tinggi.

Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten atau Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin

oleh seorang Camat. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan perangkat kecamatan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan termasuk didalamnya melaksanakan tugas pelayanan serta melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh bupati.

Dari data aparatur negara (pegawai negeri sipil/PNS) yang ada di Kecamatan Sesayap Hilir pada tahun 2016, tercatat sebanyak 20 orang. Sebanyak 50 persen pegawai laki-laki dan 50 persennya wanita. Sebanyak 2 orang dari seluruh PNS Daerah adalah Eselon III, sedangkan Eselon IV 6 orang dan Non Eselon 12 orang.

Tabel 4.9
Banyaknya Pegawai Negeri Sipil Daerah menurut Eselon dan Jenis Kelamin Tahun 2016

| Eselon | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|------------|-----------|-----------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I | - | - | - |
| II | - | - | - |
| III | 2 | - | 2 |
| IV | 2 | 4 | 6 |
| Non Eselon | 6 | 6 | 12 |
| Jumlah | 10 | 10 | 20 |

(Sumber : Profil Kecamatan Sesayap Hilir)

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Pada tahun 2016 di Pemerintah kecamatan Sesayap Hilir terdapat

beberapa posisi penting yang menyelenggarakan pemerintahan kecamatan seperti struktur organisasi di bawa

Tabel 4.10
Struktur Organisasi Kecamatan Sesayap Hilir, 2017

| | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Camat | Jamli |
| Sekretaris Camat | Abdillah |
| Sub Bagian Perenc Prog dan Keuangan Staff | Nunik Anggraini Melly Kotto Ernie Diana Novianti |
| Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Staff | Agus Pratiwi Kastinah Majamudin Karmila |
| Kasi Pemerintahan Staff | Sri Lestari Muhardi Kurniawan Ismatsyah |
| Kasi Kesos Pendapatan dan Kekayaan Staff | Bustamin Hesty Darmahandayani |
| Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Staff | Sovia Nailly Mujahid Akbar Sugiantoro |
| Kasi Trantib Staff | Syarifudin |
| Sekretaris Desa : | Mashudsyah |
| Sekretaris Desa Sengkong | Iberahim |
| Sekretaris Desa Bandan Bikis | |

Sumber: Kecamatan Sesayap Hilir

f. Proyek Pembangunan Desa

Proyek pembangunan desa bertujuan untuk pemerataan pembangunan di pedesaan. Proyek pembangunan desa yang ada pada tahun 2016 dilaksanakan melalui alokasi dana desa (ADD).

Tabel 4.11
Pagu Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Desa, 2017

| Desa | SILFA 2016 | ADD Tahun 2017 | Jumlah ADD |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. Sesayap | 48.528.986,00 | 1.028.695.263,00 | 1.077.224.249,00 |
| 2. Sengkong | 40.144,00 | 862.861.653,00 | 862.901.797,00 |
| 3. Bebatu | 318.420.024,00 | 973.845.402,00 | 1.292.265.426,00 |
| 4. Bandan Bikis | 90.000.000,00 | 952.215.093,00 | 1.342.215.093,00 |
| 5. Sepala Dalung | 88.443.754,00 | 1.055.941.605,00 | 1.144.385.359,00 |
| 6. Seludau | 183.618,00 | 838.550.826,00 | 838.734.444,00 |
| 7. Menjelutung | | 919.021.602,00 | 919.021.602,00 |
| Jumlah | 1.038.821.709,00 | 7.484.051.498,00 | 8.522.873.207,00 |

(Sumber: profil Kecamatan Sesayap Hilir)

g. Sosio Demografis

Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk pada suatu wilayah dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui kecenderungan penyebaran penduduk. Jumlah penduduk yang besar cenderung mengelompok pada tempat-tempat tertentu sehingga menyebabkan pola penyebaran bervariasi. Kepadatan

penduduk yang tinggi pada umumnya dapat dijumpai pada daerah-daerah yang mempunyai aktifitas tinggi, adanya sarana transportasi yang memadai dan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik.

Aspek kependudukan memiliki posisi yang cukup penting bagi pembangunan daerah, sehingga data kependudukan sangat diperlukan untuk penentuan kebijaksanaan maupun perencanaan program. Dalam skala yang lebih luas lagi data penduduk dengan deskripsi kecenderungan sangat berguna dalam mengevaluasi kegiatan yang lalu dan yang sedang berjalan bahkan dapat memperkirakan bentuk dan volume kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang.

Sesuai hasil Sensus Penduduk 2010 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Kecamatan Sesayap Hilir adalah 4.563 jiwa. Seiring dengan perkembangan Kabupaten Tana Tidung mengakibatkan pula perkembangan penduduk di Kecamatan Sesayap Hilir, sehingganya tahun 2017 jumlah penduduk Sesayap Hilir berdasarkan proyeksi hasil SP 2010 adalah 6.536 jiwa, artinya ada peningkatan jumlah penduduk sebesar 43,24 persen atau 1.973 jiwa.

Kalau dilihat dari kepadatan penduduk masing-masing desa, maka desa yang terpadat penduduknya adalah Desa Menjelutung sebesar 10,47 jiwa/km² sedangkan desa yang memiliki kepadatan penduduk paling kecil adalah Desa Bebatu

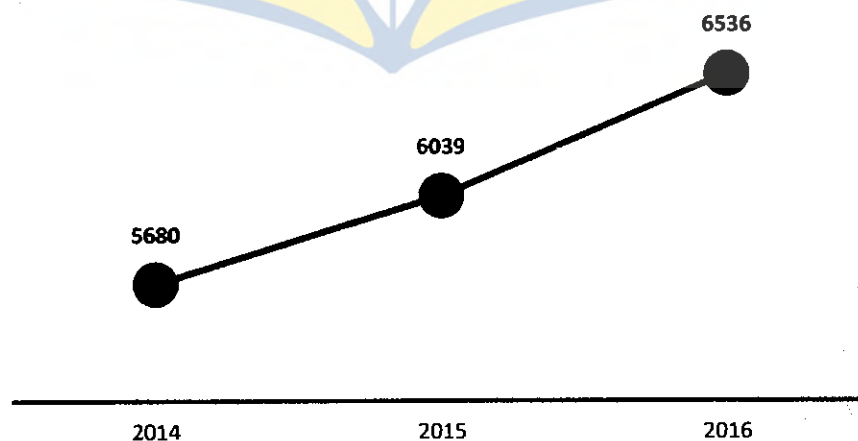
2,18 jiwa/km². Namun secara keseluruhan kepadatan penduduk di Kecamatan Sesayap Hilir adalah 4,31 jiwa/km².

Tabel 4.12
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk, 2016

| Desa | | Luas Wilayah Km ² | Jumlah Penduduk (jiwa) | Kepadatan Penduduk (Jiwa /km ²) |
|------------------|------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| (1) | | (2) | (3) | (4) |
| 1. Sesayap | | 362,17 | 1 845 | 5,09 |
| 2. Sengkong | | 118,39 | 344 | 2,91 |
| 3. Batu | | 276,62 | 635 | 2,29 |
| 4. Bandan Bikis | | 171,89 | 1 101 | 6,41 |
| 5. Sepala Dalung | | 168,79 | 1 128 | 6,68 |
| 6. Seludau | | 121,26 | 304 | 2,51 |
| 7. Menjelutung | | 98,41 | 1 179 | 11,98 |
| 8. Sesayap Selor | | *) | *) | *) |
| | | | | |
| Jumlah | 2016 | 1 317,53 | 6 536 | 4,96 |
| | 2015 | 1 317,53 | 6 039 | 4,58 |
| | 2014 | 1 317,53 | 5 680 | 4,31 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Tidung

Grafik 1
Perkembangan Penduduk Kecamatan Sesayap Hilir 2014-2016 (jiwa)



Ditinjau dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa penduduk laki-laki masih lebih banyak dibandingkan dengan perempuan, ini terlihat dari rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin penduduk Kecamatan Sesayap Hilir pada tahun 2016 adalah 149,34 ini berarti bahwa setiap 100 orang perempuan berbanding sekitar 149 – 150 orang laki-laki.

Tabel 4.13
Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin, 2016

| Desa | Penduduk | | | Rasio Jenis Kelamin | |
|------------------|-----------|-----------|--------|---------------------|--------|
| | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1. Sesayap | 983 | 862 | 1 845 | 114,04 | |
| 2. Sengkong | 183 | 161 | 344 | 113,66 | |
| 3. Bebatu | 356 | 279 | 635 | 127,60 | |
| 4. Bandan Bikis | 647 | 454 | 1 101 | 142,51 | |
| 5. Sepala Dalung | 611 | 517 | 1 128 | 118,18 | |
| 6. Seludau | 147 | 157 | 304 | 93,63 | |
| 7. Menjelutung | 952 | 227 | 1 179 | 419,38 | |
| 8. Sesayap Selor | *) | *) | *) | *) | |
| Jumlah | 2016 | 3 879 | 2 657 | 6 536 | 145,99 |
| | 2015 | 3 640 | 2 453 | 6 093 | 148,39 |
| | 2014 | 3 402 | 2 278 | 5 680 | 149,34 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Tidung

h. Penyebaran dan Kepadatan Penduduk

Pola penyebaran penduduk di suatu wilayah sejalan dengan perkembangan kemajuan sarana prasarana serta kemudahan

menjangkau berbagai akses informasi di lingkup wilayah tersebut. Persebaran penduduk di Kecamatan Sesayap Hilir secara geografis dapat dikatakan belum merata sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat kepadatan penduduk antar desa yang cukup besar. Pola persebaran penduduk Kecamatan Sesayap Hilir per desa dilihat berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduknya. Kepadatan rata-rata penduduk Kecamatan Sesayap Hilir adalah 4,96 jiwa/km² (tabel 4.1).

Masyarakat Kecamatan Sesayap Hilir terdiri atas berbagai suku antara lain Tidung dan Dayak Brusu. Masyarakat Sesayap Hilir bentuknya yang asli memiliki struktur hukum adat tersendiri, bentuk masyarakat hukum adat tersebut berbeda antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya, kelompok-kelompok tersebut menyebar di berbagai tempat di Kecamatan Sesayap Hilir. Penduduk pendatang yang menetap di Sesayap Hilir terdiri dari kelompok etnis terbesar adalah Bugis, Jawa, Timor, selain itu etnis lain yang cukup banyak jumlahnya adalah Toraja dan lain-lain. Banyaknya Penduduk pendatang ini akibat adanya program transmigrasi yang dilakukan sejak tahun 2000-an oleh pemerintah kabupaten Bulungan dengan memindahkan masyarakat dari pulau Jawa. Kemudian beberapa tahun terakhir juga dilakukan program transmigrasi.

Tabel 4.14
Banyaknya Transmigrasi dan Penyebarannya Menurut Desa, 2016

| Desa | Jumlah Kepala Keluarga | Jumlah Jiwa | Daerah Asal |
|-------------|------------------------|-------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Menjelutung | 65 | 273 | DIY, Lokal |
| | | | |
| 2016 | 65 | 273 | |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Tidung

i. Komposisi Penduduk dan Struktur Umur

Berdasarkan angka proyeksi tahun 2016 struktur umur penduduk Kecamatan Sesayap Hilir tergolong sedang dalam transisi dari kategori penduduk intermediate ke penduduk tua, dengan proporsi penduduk usia muda (dibawah 15 tahun) sekitar 36,98 persen, penduduk usia produktif (15-64 tahun) 60,95 persen dan proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun keatas) masih 2,06 persen. Komposisi seperti ini tidak terlepas dari sifat kependudukan di daerah ini, dimana sebagai daerah terbuka dengan potensi sumber daya alamnya, menyebabkan pengaruh mobilitas penduduk yang tinggi. Dengan kondisi yang demikian angka beban tanggungan juga akan semakin rendah. Secara rata-rata setiap 100 penduduk produktif pada tahun 2016 menanggung hidup sekitar 39-40 penduduk tidak produktif.

Tabel 4.15
Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur, 2016

| Kelompok Umur | Penduduk | | | | |
|---------------|-----------|-----------|------------|--------|-------|
| | Laki-laki | Perempuan | Persentase | Jumlah | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 0-4 | 431 | 423 | 13,07 | 854 | |
| 5-9 | 453 | 362 | 12,47 | 815 | |
| 10-14 | 440 | 308 | 11,44 | 748 | |
| 15-19 | 258 | 176 | 6,64 | 434 | |
| 20-24 | 373 | 213 | 8,97 | 586 | |
| 25-29 | 391 | 240 | 9,65 | 631 | |
| 30-34 | 320 | 213 | 8,15 | 533 | |
| 35-39 | 382 | 224 | 9,27 | 606 | |
| 40-44 | 324 | 176 | 7,65 | 500 | |
| 45-49 | 196 | 142 | 5,17 | 338 | |
| 50-54 | 129 | 51 | 2,75 | 180 | |
| 55-59 | 62 | 30 | 1,41 | 92 | |
| 60-64 | 40 | 44 | 1,29 | 84 | |
| 65-69 | 49 | 44 | 1,42 | 93 | |
| 70+ | 31 | 11 | 0,64 | 42 | |
| Jumlah | 2016 | 3 879 | 2 657 | 100 | 6 536 |
| | 2015 | 3 640 | 2 453 | 100 | 6 093 |
| | 2014 | 3 402 | 2 278 | 100 | 5 680 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Tidung

j. Kemiskinan

Kemajuan pembangunan ekonomi diantaranya juga tercermin dari keberhasilan program pemerintah dalam usaha mengurangi jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 telah berdampak negatif pada seluruh tatanan ekonomi dan sosial di Indonesia. Salah satu dampaknya adalah jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan semakin bertambah. Kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang memiliki batas beragam, belum ada satu batasan tunggal yang dapat dijadikan acuan dalam menjelaskan fenomena kemiskinan secara jelas.

Pemerintah Indonesia selama ini selalu memberikan perhatian yang besar terhadap upaya penanggulangan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data dan informasi kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Ketersediaan data dan informasi kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan serta pencapaian tujuan/sasaran dari kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan pada tingkat nasional, tingkat daerah (khususnya daerah kabupaten/kota), maupun tingkat wilayah kecil komunitas.

Tabel 4.16
Jumlah Rumah Tangga Penerima Raskin menurut Desa, 2016

| Desa | Jumlah Keluarga (KK) | Jumlah Beras (kg) |
|------------------|----------------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. Sesayap | 71 | 1 065 |
| 2. Sengkong | 14 | 210 |
| 3. Bebatu | 62 | 930 |
| 4. Bandan Bikis | 35 | 525 |
| 5. Sepala Dalung | 69 | 1 035 |
| 6. Seludau | 18 | 270 |
| 7. Menjelutung | 16 | 240 |
| Jumlah / Total | 285 | 4 275 |

Sumber : Kantor Camat Sesayap Hilir

Pada tahun 2016 jumlah penerima raskin kecamatan Sesayap Hilir sebanyak 285 Keluarga dengan Jumlah beras sebanyak 4.275 kg yang didistribusikan ke desa-desa. Di desa Sesayap sebanyak 71 keluarga dengan jumlah beras sebanyak 1.065 kg, di desa Sengkong jumlah keluarga yang menerima raskin sebanyak 14 keluarga dengan jumlah beras sebanyak 210 kg, desa Bebatu sebanyak 62 keluarga menerima raskin dengan jumlah beras sebanyak 930 kg, desa Badan Bikis sebanyak 35 keluarga penerima raskin dengan jumlah beras sebanyak 525 kg, di desa Sepala Dalung penerima raskin sebanyak 69 keluarga dengan jumlah beras 1.035 kg, desa Seludau jumlah penerima raskin sebanyak 18 keluarga dengan jumlah beras sebanyak 270 kg tidak berbeda jauh dengan penerima raskin di desa Menjelutung yaitu

sebanyak 16 keluarga dengan jumlah beras yang diterima yaitu sebanyak 240 kg.

Adanya ketimpangan pendapatan mengakibatkan terjadinya lapisan dalam masyarakat karena perbedaan tingkat kesejahteraan. Dari segi tahapan pencapaian tingkat kesejahteraannya, maka keluarga dikelompokkan atas 5 (lima) tahap :

1. Keluarga pra sejahtera : adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal seperti, kebutuhan pengajaran agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan
2. Keluarga sejahtera tahap I : adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologis, seperti kebutuhan akan pendidikan, keluarga berencana, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi
3. Keluarga sejahtera tahap II : adalah keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya juga telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan sosial psikologinya akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan perkembangannya, seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi.
4. Keluarga sejahtera tahap III : adalah keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologi dan kebutuhan perkembangannya, namun belum dapat

memberikan sumbangan yang maksimal terhadap masyarakat, seperti secara teratur memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan serta berperan serta secara aktif dengan menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olah raga, pendidikan dan sebagainya.

5. Keluarga sejahtera tahap III plus: adalah keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, baik yang bersifat dasar, sosial psikologis maupun yang bersifat pengembangan serta telah dapat pula memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat, dan aktif menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan.

k. Perekonomian

Sektor unggulan dan komoditas unggulan yang dimiliki oleh Kecamatan Sesayap Hilir yaitu :

1. Sektor Pertanian, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;
2. Sektor Pertambangan

Mengingat sebagian besar wilayah Sesayap Hilir berupa lahan pertanian maka saat ini dan masa yang akan datang sektor ini akan menjadi salah satu sektor unggulan yang diunggulkan. Memang sebelum ditemukannya SDA Non Migas di Kecamatan

Sesayap Hilir, maka sektor pertanian merupakan sektor penyumbang terbesar terhadap pembentukan PDRB.

B. Kinerja pembangunan desa terpencil

Kinerja pembangunan desa terpencil adalah pencapaian hasil pembangunan desa berdasarkan dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan pemerintah di kawasan perdesaan yang terisolasi dari pusat pertumbuhan/daerah lain akibat tidak memiliki atau kekurangan sarana (Infrastruktur) perhubungan, sehingga menghambat pertumbuhan/perkembangan kawasan.

Untuk mengetahui kinerja pembangunan desa terpencil maka pada pembahasan ini akan menganalisis pencapaiannya dilihat dari indikator;

Tersedianya prasaranan dan saran aksesbillitas.

(Margaretta, 2000:20) Salah satu hal yang penting tentang transfortasi dengan perkembangan wilayah adalah aksesibilitas. Yang dimaksud aksesibilitas adalah kemampuan atau keadaan suatu wilayah, region untuk dapat diakses oleh pihak luar baik secara langsung atau tidak langsung.

(Adisasmita 2013: 95) dikatakan bahwa salah satu unsur fundametal dalam pembangunan perdesaan adalaha jaringan transfortasi. Karena salah satu prasarana dan sarana pokok dan penting untuk membuka isolasi daerah desa terpencil dengan daerah lainnya adalah prasarana transportasi (seperti jalan raya, jembatan, prasarana transportasi laut, sungai)

sedangkan sarana transportasi (seperti mobil, sepeda motor, kapal laut, perahu mesin dan sebagainya) yang di gunakan. Ketersediaan parasarana dan sarana transportasi yang memadai akan mendukung arus orang dan barang yang dikatakan keluar dan masuk ke daerah pedesaan dengan cepat dan mudah, Transportasi mendukung perkembangan desa dan wilayah sebagai sarana penghubung.

Daerah Kecamatan Sesayap Hilir terdapat 4 desa yang aksesnya jalan menuju ke desa hanya bisa dilalui menggunakan transportasi sungai, untuk transportasi darat hingga saat ini belum memungkinkan dilalui, segala aktifitas keluar wilayah desa lainnya melalui jalur sungai, upaya pemerintah daerah untuk membangun jalan sudah di lakukan dalam beberapa tahun sebelumnya, hanya saja sampai saat ini belum terealisasi secara penuh, karena beberapa alasan yaitu;

- 1) Untuk pembuatan akses jalan darat menuju desa terpencil melewati kawasan hutan produksi yang mana dalam pengalihan fungsi status lahan tersebut harus memiliki izin dari kementerian terkait sehingga akan membutuhkan waktu.
- 2) Pembukaan dan pembangunan jalan menuju desa terpencil hingga sampai dapat di fungsikan, akan menelan biaya yang cukup besar.
- 3) Jenis tanah gambut, memerlukan penanganan khusus, serta memerlukan tanah timbunan yang banyak sedangkan material tanah timbunan berada jauh dari lokasi.

“Wawancara bersama Sekretaris camat dikatakan bahwa di kecamatan sesayap hilir sebagian desa berada di daerah pesisir sungai, tentunya prasarana dan sarana air yang terpenting. jumlah pelabuhan kapal/speed boat, di kecamatan sesayap hilir yaitu; memiliki 5 pelabuhan speed utama yang tidak permanen yang di dimanfaatkan oleh masyarakat melakukan aktifitas bekerja , usah maupun yang liannya, sedangkan pembongkaran kapal barang belum memungkinkan bagi kapal besar”

Tabel 4. 17
Banyaknya armada Speed boat menurut Desa,
Tahun 2016

| Desa | Jumlah |
|---------------|--------|
| (1) | (2) |
| Sesayap | 1 |
| Sengkong | 1 |
| Bebatu | 4 |
| Bandan Bikis | 2 |
| Sepala Dalung | 4 |
| Seludau | - |
| Menjelutung | 2 |
| Jumlah | 14 |

Sumber : Kecamatan Sesayap Hilir

Selain angkutan darat, angkutan laut dan sungai mempunyai peranan penting dalam hal transportasi di Kecamatan Sesayap Hilir. Hal ini dikarenakan akses angkutan laut dan sungai lebih mudah dan lebih cepat daripada melalui darat. Lalu lintas antar pulau tahun 2016 melalui pelabuhan masing-masing desa ke Tarakan melalui speed boat tersedia 14 armada.

Sarana dan prasarana transportasi (pengangkutan) juga memegang peranan penting dalam usaha mencapai tujuan

pengembangan ekonomi dalam suatu daerah. Adapun tujuan pengembangan ekonomi yang bisa diperkenankan oleh jasa transportasi adalah:

- 1) Meningkatkan pendapatan desa, disertai dengan distribusi yang merata antara penduduk, bidang usaha dan daerah.
- 2) Meningkatkan jenis dan jumlah barang jadi dan jasa yang dapat dihasilkan para konsumen, industri dan pemerintah.
- 3) Mengembangkan industrial desa yang dapat menghasilkan pendapatan desa.
- 4) Fungsi lain transportasi adalah untuk mengangkut penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Kebutuhan akan angkatan penumpang tergantung fungsi bagi kegunaan seseorang (personal place utility). Peranan transportasi tidak hanya untuk melancarkan barang atau mobilitas manusia. Tansportasi juga membantu tercapainya pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara optimal. Transportasi berfungsi sebagai sektor penunjang pembangunan dan pemberi jasa perkembangan ekonomi.

Pembangunan transportasi di Kecamatan Sesayap Hilir memiliki arti terpenting dan strategis untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Berdasarkan karakteristiknya, wilayah Kecamatan Sesayap Hilir dapat di kategorikan dua kawasan yang berbeda, yakni kawasan

pantai/pesisir dan pedalaman. Kawasan pantai/pesisir merupakan kawasan yang berkembang lebih pesat dibandingkan kawasan pedalaman. Meskipun hampir semua kawasan memiliki potensi sumber daya alam yang besar, namun karena terletak secara geografis dan topografinya relatif sulit dan berat, sehingga kawasan pedalaman/ mengalami ketertinggalan.

Dengan kondisi minimnya aksesibilitas dan pola penyebaran penduduk yang jarang semakin menciptakan kesenjangan ekonomi dan disparitas regional antar kawasan-kawasan tersebut. Dengan demikian pembangunan transportasi sangat berperan dalam langkah awal dalam upaya pemerataan pembangunan di semua sektor. Disamping itu, selain berfungsi sebagai prasarana yang dapat membuka daerah-daerah yang masih tertinggal dan terisolasi juga dapat menumbuhkan minat investasi karena terbangunnya ruas jalan yang melalui lokasi deposit sumber-sumber daya galian/mineral.

Prasarana Jalan

Sarana dan prasarana transportasi di Sesayap Hilir terutama untuk kawasan pedalaman dan terpencil masih sangat terbatas. Moda transportasi pada kawasan tersebut tertumpu pada moda angkutan sungai karena jaringan jalan yang tersedia terbatas. Distribusi barang dan jasa menggunakan moda angkutan sungai masih ditemui kendala seperti pendistribusian memerlukan waktu

yang lama. Untuk pembukaan jaringan jalan merupakan alternatif terbaik dalam mempermudah aksesibilitas ke kawasan pedalaman dan perbatasan. Peningkatan dan pembangunan jalan yang menghubungkan desa-desa ke kota kecamatan dan dari kota kecamatan ke ibu kota kabupaten, hal ini diharapkan dapat membuka daerah terpencil dan terisolir dari keterbatasan dan ketertinggalan sehingga fungsi distribusi dapat lebih optimal.

Jalan merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian, makin meningkat usaha pembangunan menuntut pola peningkatan pembangunan jalan untuk daerah ke daerah lain.

Panjang jalan di wilayah Kecamatan Sesayap Hilir pada tahun 2016 mencapai 84,22 km. Jika dilihat dari kondisi, jalan yang berada dalam kondisi baik sepanjang 72,52 km dan dalam kondisi sedang sepanjang 4,75 km, dalam kondisi rusak sepanjang 6,95 km.

Tabel 4. 18
Perkembangan Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan, 2016

| Keadaan | Panjang Jalan (km) |
|---------------|--------------------|
| (1) | (2) |
| - Baik | 72,52 |
| - Sedang | 4,75 |
| - Rusak | 6,95 |
| - Rusak Berat | - |

Sumber : Profil Kecamatan Sesayap Hilir 2017

Panjang jalan kabupaten dirinci menurut jenis permukaan yang diaspal 21,70 km, permukaan tidak diaspal 24,38 km, dan permukaan lainnya 38,13 km.

Tabel 4. 19
Perkembangan Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan, 2016

| Keadaan | Panjang Jalan (km) |
|-----------------|--------------------|
| (1) | (2) |
| Jenis Permukaan | |
| - Aspal | 21,70 |
| - Tidak diaspal | 24,38 |
| - Lainnya | 38,13 |

Sumber : Profil Kecamatan Sesayap Hilir 2017

C. Kinerja Percepatan Pembangunan Desa Tertinggal

Kinerja percepatan pembangunan desa tertinggal adalah pencapaian hasil pembangunan desa dengan melakukan percepatan pembangunan berdasarkan dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan pemerintah di kawasan perdesaan yang ketersediaan sarana dan prasarana dasar wilayahnya kurang/tidak ada (tertinggal) sehingga menghambat pertumbuhan/perkembangan kehidupan masyarakatnya dalam bidang ekonomi (kemiskinan) dan bidang pendidikan (keterbelakangan).

Adisasmita (2013: 125) Prasarana fisik mempunyai peranan yang sangat penting untuk menunjang berbagai kegiatan ekonomi dan sosial dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan kesejahteraan rakyat.

Untuk mengetahui kinerja percepatan pembangunan desa tertinggal maka pada pembahasan ini akan menganalisis pencapaiannya dilihat dari indikator ; 1). Tersedianya infrastruktur fisik dan sosial, 2). Tersedianya sarana ekonomi dan 3). Tersedianya sarana sosial.

a) Tersedianya infrastruktur fisik dan sosial yaitu;

1) Terpenuhi sarana dasar (Air bersih, Listrik)

Listrik dan Air merupakan suatu kebutuhan yang utama bagi masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Sesayap Hilir. Untuk kebutuhan listrik di kecamatan sebagian besar dipenuhi oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sementara sebagian lagi disuplai oleh perusahaan swasta yang ada di Desa-desa.

Ketersediaan air bersih yang sehat sangat dibutuhkan masyarakat. Namun sampai saat ini belum ada perusahaan air minum yang menjangkau wilayah Sesayap Hilir, sehingga untuk keperluan air bersih masyarakat masih mengandalkan air hujan, air sungai dan air bor

Tabel 4.20
Prasarana kebutuhan dasar masyarakat
Kecamatan Sesayap Hilir

| NO | Desa | Kebutuhan Dasar | | Keterangan |
|----|---------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------|
| | | Air Bersih (PDAM) | Listrik (PLN) | |
| 4 | Sesayap | Tidak ada | Ada | Memfaatkan air hujan, sumur bor dan air sungai |
| 2 | Sepala Dalung | Tidak ada | Ada | Memfaatkan air hujan, sumur bor dan air sungai |

| | | | | |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Seludau | Tidak ada | Ada | Memanfaatkan air hujan sumur bor dan air sungai |
| 4 | Sesayap Selor | Tidak ada | Ada | Memanfaatkan air hujan sumur bor dan air sungai |
| 5 | Menjelutung | Tidak ada | Tidak ada | Memanfaatkan air hujan sumur bor, listrik ikut perusahaan selama 12 jam |
| 6 | Sengkong | Tidak ada | Tidak ada | Memanfaatkan air hujan. listrik menggunakan genset desa 12 jam yang solarnya di subsidi oleh pihak swasta |
| 7 | Bandan Bikis | Tidak ada | Tidak ada | Memanfaatkan air hujan dan air sungai, listrik ikut perusahaan selama 12 jam |
| 8 | Bebatu | Tidak ada | Tidak ada | Memanfaatkan air hujan, listrik ikut perusahaan selama 12 jam |

Sumber : Hasil wawancara dan observasi lapangan

“wawancara bersama Sekretaris Camat, untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yaitu air bersih dan listrik, saat ini air bersih belum ada hanya memanfaatkan air hujan dan sumur-sumur bor dan air sungai saja, tapi kalau untuk listrik 4 desa telah terpenuhi, namun 4 desa lainnya belum dapat terpenuhi di karenan akses menuju desa tersebut sampai saat ini tidak memungkinkan jaringan listrik masuk kesana. Pemerintah kecamatan hanya mengupayakan melalui koordinasi dengan instansi terkait dan juga pihak perusahaan swasta yang berdomisili di desa-desa tertinggal untuk dapat membantu permasalahan tersebut, saat ini 4 desa tertinggal yang belum adanya listrik dan air bersih di bantu oleh pihak perusahaan melalui program CSR mereka”

2) Tersedianya sarana ekonomi (pasar, industri)

Membangun pasar desa adalah salah satu pilihan jitu bagi desa untuk membangun putaran ekonomi domestik (internal) desa. Di pasar desa, warga desa yang memproduksi aneka produk bisa memajang produknya dan bertemu langsung dengan para pembeli. Mulai dari produsen sayur yang bisa langsung mengusung sayurnya dari sawah hingga para pembuat perkakas berbahan kayu misalnya. Pasar yang menjadi tempat berkumpul aneka produk juga bisa membangun semangat mandiri karena warga bakal lebih memilih produk yang dibuat warganya sendiri daripada membeli dari luar daerah.

Tabel 4.21
Daftar sarana ekonomi desa di Kecamatan Sesayap Hilir
(pasar dan industri)

| NO | Desa | Sarana Ekonomi Desa | | Keterangan |
|----|---------------|---------------------|----------|----------------------------|
| | | Pasar | Industri | |
| 1 | Sesayap | 1 | - | Pasar Buka 1 Minggu Sekali |
| 2 | Sepala Dalung | 1 | - | Pasar Tidak berfungsi |
| 3 | Seludau | - | - | - |
| 4 | Sesayap Selor | 1 | - | Pasar tidak berfungsi |
| 5 | Menjelutung | 1 | - | Pasar Tidak berfungsi |
| 6 | Sengkong | - | - | - |
| 7 | Bandan Bikis | - | - | - |
| 8 | Bebatu | 1 | - | Pasar Tidak berfungsi |

(Sumber ; Wawancara dan observasi di lapangan)

Temuan dilapangan pasar-pasar yang ada di Kecamatan Sesayap Hilir banyak yang tidak berfungsi sedangkan untuk prasarana sudah ada di siapkan oleh pemerintah.

“Wawancara bersama dengan sekretaris Camat dikatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah sebagian besar petani dan nelayan banyak belalih profesi menjadi karyawan perusahaan, adapun untuk produksi sayur dan ikan sudah mulai tidak menghasilkan, mengharpakan pasokan dari luar kecamatan”.

“Hasil wawancara dengan kepala desa Sepala Dalung dikatakan pasar yang ada sekarang tidak berfungsi sebagai mana mestinya salah satu penyebabnya adalah jalan akses menuju pasar masih tidak baik, kita sudah koordinasi dengan pihak kecmatan dan dinas terkait namun sampai saat ini belum ada kelanjutan lagi, di tambahkan juga untuk orang yang mendaftar jualan sudah siap, jauh hari.”

3) Tersedianya sarana sosial (Kesehatan dan Pendidikan)

a. Tersedianya sarana kesehatan

Pada dasarnya pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah. Dengan meningkatnya pelayanan kesehatan, pemerintah berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyediakan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang jumlahnya cukup memadai.

Kebijakan pembangunan dalam urusan kesehatan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan

sasaran untuk menurunkan angka kematian bayi dan angka kematian ibu, menurunkan angka kesakitan dan pemenuhan gizi masyarakat. Kegiatan pembangunan kesehatan diprioritaskan pada penyuluhan kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan dasar, peningkatan fasilitas prasarana dan sarana kesehatan.

Berdasarkan data dari dinas kesehatan, pada tahun 2016 ini jumlah fasilitas kesehatan yang ada di wilayah Kecamatan Sesayap Hilir belum ada Rumah Sakit, 1 buah Puskesmas, 4 buah Puskesmas Pembantu, 1 buah Toko Obat dan 7 buah Posyandu.

Tabel 4.22
Banyaknya Fasilitas Kesehatan, 2016

| Jenis Fasilitas Kesehatan | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------|------|------|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. Rumah Sakit | - | - | - |
| 2. Puskesmas | 1 | 1 | 1 |
| 3. Puskesmas Pembantu | 4 | 4 | 4 |
| 4. Toko Obat | 1 | 1 | 1 |
| 5. Posyandu | *) | *) | 7 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung

Untuk tenaga kesehatan terdapat 2 orang dokter yang terdiri dari dokter umum dan dokter gigi. Untuk tenaga kesehatan yang lain terdapat 33 orang tenaga perawat dan

bidan, sedangkan tenaga farmasi 1 orang, dan tenaga kesehatan lainnya 5 orang.

Tabel 4.23
Banyaknya Tenaga Kesehatan, 2016

| Tenaga Kesehatan | Jumlah |
|-----------------------------|--------|
| [1] | [2] |
| 1. Dokter | 2 |
| 2. Tenaga Keperawatan | 19 |
| 3. Tenaga Kebidanan | 14 |
| 4. Tenaga Kefarmasian | 1 |
| 5. Tenaga Kesehatan lainnya | 5 |
| Jumlah | 41 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung.

“Hasil Wawancara dari kepala desa, dikatakan pemerintah kabupaten dan pemerintah telah menyiapkan sarana dan prasaran kesehatan dan dibantu juga oleh bagian kesehatan pihak perusahaan untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakat namun tetap saja untuk penanganan penyakit yang darurat mesti dirujuk ke pemerintah daerah kabupaten/Kota terdekat dari desa. Hanya saja karena berada di daerah terpencil akses perjalanan membutuhkan dana yang cukup besar dan, resiko perjalanan malam hari pada saat rujuk pasien.”

“Wawancara bersama kepala seksi kesejahteraan dan pendapatan, dikatakan juga dalam masalah kesehatan untuk pihak kecamatan juga membantu melakukan pembinaan melalui ibu-ibu PKK kecamatan, ke ibu-ibu PKK desa melalui pokja, berkenaan kesehatan di masyarakat. serta melalui pemerintah kecamatan juga sering mengkoordinasikan dan sosialisasi bahwa masyarakat mesti memiliki kartu BPJS baik itu mandiri maupun yang di subsidi pemerintah daerah”

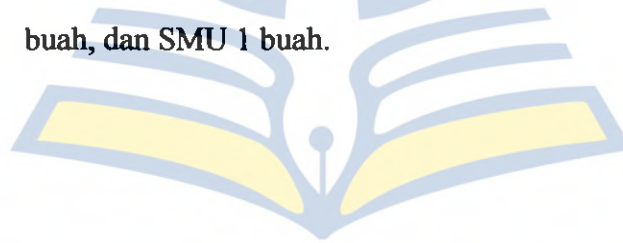
b. Tersedianya sarana Pendidikan

Banyak pendapat yang mengatakan bahwa hanya negara yang mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas yang akan mampu bersaing dengan negara lain dalam era globalisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah khususnya pemerintah daerah perlu lebih mengedepankan upaya peningkatan kualitas SDM melalui program-program pembangunan yang lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pendidikan baik formal maupun non formal. Karena sudah saatnya masyarakat menyadari bahwa pendidikan merupakan kebutuhan yang tak kalah pentingnya dibandingkan dengan kebutuhan lainnya. Dalam institusi terkecil seperti rumah tangga, pendidikan seyogyanya telah menjadi kebutuhan utama. Kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi hal tersebut, karena bagaimanapun juga SDM yang bermutu merupakan syarat utama bagi terbentuknya peradaban yang baik.

Pendidikan formal merupakan suatu proses pendidikan yang berjenjang dari tingkat terendah Taman Kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan dibidang pendidikan, pendidikan formal yang umumnya diselenggarakan sekolah-sekolah tidak hanya yang dibawah oleh Kementrian Pendidikan saja, tetapi ada juga

yang dibawah oleh Instansi/Departemen selain Diknas, seperti Kementrian Agama, Kementrian Kesehatan, Kementrian Sosial, Kementrian Pertanian, dan lainnya. Melalui proses pendidikan diharapkan akan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih mampu bersaing dalam berbagai aspek kegiatan. Jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan menunjukkan ketersediaan kualitas sumber daya manusia pada suatu wilayah. Semakin banyak jumlah penduduk yang menamatkan sekolah tinggi, maka semakin baik pula ketersediaan kualitas sumber daya manusia.

Banyaknya sekolah dari tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Umum pada tahun 2016/2017 terdiri dari TK 3 buah, SD 9 buah; SMP 2 buah, dan SMU 1 buah.



Tabel 4.24
Jumlah Sekolah menurut Desa, 2016

| Kecamatan | TK | SDN | SMPN | SMAN |
|---------------------|-----|-----|------|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. Sesayap | - | 2 | 1 | 1 |
| 2. Sengkong | - | 1 | - | - |
| 3. Bebatu | 1 | 1 | - | - |
| 4. Bandan Bikis | 1 | 1 | 1 | - |
| 5. Sepala Dalung | 1 | 2 | - | - |
| 6. Seludau | - | 1 | - | - |
| 7. Menjelutung | - | 1 | - | - |
| Jumlah | 3 | 9 | 2 | 1 |

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dapat dilihat dari tingkat kelulusan siswa yang melaksanakan Ujian Akhir Nasional (UAN) yang mengikuti standar kelulusan yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. Pada tahun ajaran 2016/2017 ini untuk tingkat SD,SMP dan SMU sebanyak 100 persen telah memenuhi standar kelulusan.

Perbandingan atau rasio antara guru dan murid akan menggambarkan beban yang harus dihadapi oleh seorang guru dalam mengajar. Jumlah guru untuk jenjang pendidikan SD hingga SMU pada tahun 2017 yaitu 198

orang sedangkan jumlah murid 1.241 orang sehingga perbandingan rata-ratanya setiap guru mengajar 6 hingga 7 orang murid. Jika dilihat dari masing-masing tingkat/jenjang pendidikan, di tingkat SD setiap guru mengajar rata-rata 5 - 6 orang murid; di tingkat SMP rata-rata 9 - 10 orang, dan tingkat SMU rata-rata 6 - 7 orang murid.

Tabel 4.25
Jumlah Sekolah, Banyaknya Murid, dan Guru
di Berbagai Jenjang Pendidikan Tahun Ajaran
2016/2017

| Jenjang Pendidikan | Banyaknya Sekolah | Banyaknya Murid | Banyaknya Guru | Rasio Murid thd Guru |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| SD Negeri | 9 | 732 | 137 | 5,34 |
| SMP Negeri | 2 | 324 | 34 | 9,52 |
| SMU Negeri | 1 | 185 | 27 | 6,85 |

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Tana Tidung

b) Terlaksananya pembangunan ekonomi

Pemerintah menyadari bahwa rakyat harus disiapkan untuk membangun ekonomi di pedesaan. Hal ini timbul karena maraknya investor dari luar yang masuk ke pedesaan. "Takutnya pasar tradisional malah dikuasai investor dari luar.

Masyarakat desa hanya menjadi penonton atau menjadi konsumen.

Di samping itu proses pemberdayaan masyarakat juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam bidang ekonomi. Menurut Musriyadi (2014) ada tiga hal yang dapat ditempuh dalam memberdayakan masyarakat. Pertama masyarakat harus sadar akan pentingnya ekonomi kerakyatan. Kedua masyarakat harus digugah untuk membentuk gerakan-gerakan dalam memajukan ekonomi kerakyatan. Terakhir masyarakat harus dibiasakan agar menjadi produktif.

Di Kecamatan Sesayap Hilir merupakan salah satu wilayah memiliki sumber daya alam cukup besar, baik dari pertambangan, pertanian, maupun peternakan, tentunya menjadikan daya tarik investor dari luar untuk membuka usaha di Kecamatan Sesayap Hilir. Dengan banyaknya investor yang masuk tentunya akan berdampak pada perekonomian masyarakat, nantinya sebagian besar dari karyawannya perusahaan adalah masyarakat setempat. tentunya juga akan menghidupkan sektor lainya seperti perdagangan di Kecamatan Sesayap Hilir.

Pemerintah Kecamatan Sesayap Hilir dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat melakukan

sinkronisasi program pada pihak pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan kabupaten, untuk melakukan pembinaan dan pelatihan secara terus menerus, yang berdampak langsung pada kemampuan masyarakat desa, agar kemampuan yang di miliki masyarakat bertambah baik, dengan kemampun yang di miliki akan mendorong menghasilkan suatu produk yang dapat menghasilkan pendapatan, dan menghasilkan nilai tambah lebih suatu produk.

Adanya interaksi antara potensi yang dimiliki di pedesaan dan masyarakatnya, tidak hanya pihak desa yang bergerak tetapi perlu juga campur tangan dari luar sehingga perubahan yang diharapkan berdampak untuk jangka panjang, ini dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan di desa yang dikatakan desa tertinggal tersebut. Sehingga dalam upaya pembangunan tersebut, maka dibutuhkan modal yang dapat diperoleh dari kerjasama dengan pihak perbankan sebagai sumber modal.

Saat ini usaha penghidupan masyarakat sudah mulai bergeser dari sektor pertanian mengarah ke sektor budidaya ternak dan sebagian besar juga masyarakat di Kecamatan Sesayap hilir sudah berprofesi sebagai karyawan perusahaan.

“Hasil wawancara dengan kepala Desa Sepala Dalung dikatakan bahwa mata pencarian penghidupan rata-rata menjadi karyawan perusahaan yang ada di desa dan usaha budidaya sarang walalet, ada pun sisanya sebagai nelayan dan bertani itupun jumlahnya sudah menurun.

“Hasil wawancara bersama dengan kasih pemberdayaan masyarakat mengatakan upaya pemerintah kecamatan meningkatkan pendapat masyarakat desa tentunya dengan melakukan pemberdayaan sesuai dengan propesi yang digeluti, dengan bekerja sama dengan instansi terkait, PKK Kecamatan dan lembaga desa yang ada.

a. Sektor Pertanian

Pembangunan Pertanian Kecamatan Sesayap Hilir merupakan upaya pencapaian peningkatan penyediaan pangan, khususnya beras, sayur-sayuran, dan buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan gizi, baik kualitas maupun kuantitas. Perbaikan serta pengadaan sarana dan prasarana pertanian, pengembangan agribisnis komoditas unggulan secara bertahap akan diarahkan pada kawasan sentra produksi.

Tabel 4.26
Penggunaan Lahan, 2016

| Penggunaan Lahan (ha) | | | Total Luas Lahan |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| Sawah | Pertanian Bukan Sawah | Bukan Pertanian | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 983 | 92 911 | 37 859 | 131 753 |
| | | | |

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten TanaTidung

Luas panen padi Kecamatan Sesayap Hilir pada tahun 2016 sebesar 28 hektar, hanya untuk padi sawah. Sedangkan untuk

komoditi lain masih kecil sekali, seperti tabel 4.28 dan 4.39 di bawah.

Tabel 4.27
Luas Panen dan Luas Tanam Padi Palawija, 2016 (Ha)

| Padi Sawah | | Padi Ladang | | Jagung | | Kedelai | |
|------------|-------|-------------|-------|--------|-------|---------|-------|
| Panen | Tanam | Panen | Tanam | Panen | Tanam | Panen | Tanam |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 28 | 34,9 | - | - | 11 | 11 | - | - |

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Tana Tidung

Luas panen padi Kecamatan Sesayap Hilir pada tahun 2016 sebesar 28 hektar, hanya untuk padi sawah. Sedangkan untuk komoditi lain masih kecil sekali, seperti tabel 4.28 di atas.

Tabel 4.28
Luas Panen dan Luas Tanam Padi Palawija, 2016 (Ha)

| Kacang Tanah | | Kacang Hijau | | Ubi Kayu | | Ubi Jalar | |
|--------------|-------|--------------|-------|----------|-------|-----------|-------|
| Panen | Tanam | Panen | Tanam | Panen | Tanam | Panen | Tanam |
| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 |

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Tana Tidung

Berdasarkan hasil wawancara, observasi di lapangan dibandingkan tabel tahun 2016 di atas dari sektor pertanian mengalami penurunan. dan sebagian besar produk yang beredar di pasaran merupakan produk pertanian dari luar Kecamatan Sesayap Hilir.

“Hasil wawancara bersama kepala desa dikatakan bahwa pemenuhan kebutuhan sayur-mayur dan beras sebagian besar di datangkan dari luar kecamatan, lahan seperti pada sawah dan sayur menurun drastis”

b. Sektor Peternakan

Pada kurun waktu ini populasi ternak di Kecamatan Sesayap Hilir yang terbesar adalah sapi dan kambing. Untuk tahun 2016 populasi kambing di Kecamatan Sesayap Hilir sebanyak 199 ekor; kemudian sapi potong 213 ekor; dan babi 16 ekor.

Tabel 4.29
Populasi Ternak Tahun 2016 (Ekor)

| Populasi Ternak | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------|------|------|------|
| [1] | [2] | [3] | [4] |
| Sapi Potong | 192 | 217 | 213 |
| Kerbau | - | - | - |
| Kambing | 232 | 217 | 199 |
| Babi | 16 | 16 | 16 |

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Tana Tidung

Populasi unggas pada tahun 2016 sebanyak 392 ekor ayam buras, 285 ekor itik, dan 4.200 ekor ayam ras. Produksi telur ayam buras tahun ini sebesar 0,23 ton dan itik sebesar 3,38 ton.

Tabel 4.30
Populasi Unggas Tahun 2016 (Ekor)

| Jenis Unggas | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------|-------|-------|------|
| [1] | [2] | [3] | [4] |
| Ayam Kampung | 392 | 895 | 16 |
| Ayam Ras Pedaging | 4 200 | 1 200 | 3000 |
| Ayam Ras Petelur | - | - | - |
| Itik | 285 | 135 | 55 |

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Tana Tidung

“Hasil wawancara bersama kepala desa dikatakan bahwa pemenuhan perternakan menurun.

c. Sektor Perikanan

Produksi perikanan pada tahun 2016 di Kecamatan Sesayap Hilir sebesar 188,4 ton. Banyaknya rumah tangga perikanan di Kecamatan Sesayap Hilir untuk tahun 2016 adalah 100 rumah tangga.

Tabel 4.31
Produksi Perikanan, 2016 (ton)

| Produksi Perikanan | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------|-------|--------|-------|
| [1] | [2] | [3] | [4] |
| Perikanan Laut | 212,4 | 129,5 | 164,4 |
| Perairan Umum | 52,5 | 46,8 | 24 |
| Jumlah | 264,9 | 1176,3 | 188,4 |

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Tana Tidung

d. Sektor Kehutanan

Pada dasarnya hutan terbagi kedalam lima kelompok jenis hutan yaitu; hutan lindung, hutan suaka alam margasatwa, hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan lainnya/kawasan budidaya non kehutanan. Berkaitan dengan pengelolaan hutan tersebut tidak terlepas dari perusahaan HTI. Pada tahun 2016 hanya satu pemegang HTI dengan luas areal HTI sebesar 42.050 hektar.

Tabel 4.32
Luas HPH dan HTI dalam Wilayah Kecamatan Sesayap Hilir, 2016

| HPH | | HTI | |
|-----------|------------|-----------|------------|
| Luas (Ha) | Persentase | Luas (Ha) | Persentase |
| [1] | [2] | [3] | [4] |
| - | - | - | - |
| - | - | 42 050 | - |
| - | - | - | - |
| - | - | 42 050 | - |

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Tana Tidung

e. Sektor Perkebunan

Perkebunan adalah salah satu subsektor pertanian yang sedang berkembang di Kecamatan Sesayap Hilir. Perluasan areal perkebunan baik perkebunan rakyat maupun perusahaan skala besar terus ditingkatkan. Komoditi yang menjadi unggulan adalah kelapa sawit. Setidaknya kurun waktu 2016 ada 4 (empat) perusahaan yang sudah mulai melakukan penanaman dan sebagian sudah berproduksi.

Untuk produksinya masih belum optimal karena belum memasuki umur normal untuk tanama kelapa sawit berproduksi. Sementara itu untuk perkebunan rakyat, komoditi kelapa sawit juga mengalami perkembangan.

f. Pertambangan dan Peggalian

Sektor pertambangan merupakan sektor yang berperan cukup besar sebagai sumber penerimaan devisa terutama yang datang dari pendapatan ekspor minyak dan gas, batubara, serta methanol. Untuk tahun 2014 produksi batubara mencapai 6.373.284,310 M.ton

Tabel 4.33
Produksi Batubara menurut Jenis Perijinan Perusahaan, 2014
(M.Ton)

| Bulan | Jenis Perijinan Perusahaan | | | Jumlah | |
|--------------|----------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| | Daerah | KP Pusat | PKP2B | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1. Januari | 118 131,780 | - | 327 462,970 | 445 594,750 | |
| 2. Februari | 162 007,490 | - | 334 189,070 | 496 196,560 | |
| 3. Maret | 153 771,950 | - | 390 461,040 | 544 232,990 | |
| 4. April | 113 194,960 | - | 355 345,030 | 468 539,990 | |
| 5. Mei | 129 188,810 | - | 464 353,500 | 593 542,310 | |
| 6. Juni | 103 731,940 | - | 460 447,360 | 564 179,300 | |
| 7. Juli | 38 374,150 | - | 352 194,700 | 390 568,850 | |
| 8. Agustus | 72 386,290 | - | 373 885,370 | 446 271,660 | |
| 9. September | 91 378,510 | - | 435 146,730 | 526 525,240 | |
| 10. Oktober | 144 908,370 | - | 469 942,430 | 614 850,800 | |
| 11. Nopember | 242 105,140 | - | 439 477,440 | 681 582,580 | |
| 12. Desember | 244 503,580 | - | 356 695,700 | 601 199,280 | |
| Jumlah | 2014 | 1 613 682,970 | - | 4 759 601,340 | 6 373 284,310 |
| | 2013 | 1 536 173,898 | - | 3 799 117,411 | 5 335 291,309 |
| | 2012 | 791 611,910 | - | 3 219 785,216 | 4 011 397,126 |

Sumber : Dinas Pertambangan dan ESDM Kab. Tana Tidung

c) Terciptanya kelestarian lingkungan meliputi ;

1) Terciptanya kesadaran akan arti pentingnya lingkungan.

Kesadaran tentang lingkungan hidup, menyangkut kesadaran akan betapa pentingnya lingkungan hidup dalam menunjang kualitas hidup, yaitu terciptanya lingkungan hidup yang harmonis dan lestari lewat tindakan-tindakan yang positif.

Menurut Emil Salim (1982) dalam Amos (2008:27) Kesadaran Lingkungan adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran agar tidak hanya tahu tentang sampah, pencemaran, penghijauan dan perlindungan satwa langka, tetapi lebih dari pada itu semua membangkitkan kesadaran lingkungan manusia Indonesia khususnya pemuda masa kini untuk mencintai tanah dan air untuk membangun tanah air Indonesia yang adil, makmur serta utuh lestari. Selanjutnya dikatakan bahwa sadar lingkungan ini mendorong pribadi manusia untuk hidup serasi dengan alam dan dengan begitu menumbuhkan rasa religi dan gandrung akan kasih Allah yang sesungguhnya tertulis pada alam dan isi bumi ini.

2) Berkembangnya kepedulian lingkungan semua pihak.

Upaya yang dilakukan dalam berkembangnya kepedulian lingkungan semua pihak, tentunya lebih efektif melalui pengembangan pendidikan lingkungan.

Upaya pendidikan lingkungan hidup adalah upaya mengubah sikap dan perilaku yang dilakukan oleh elemen masyarakat atau berbagai pihak yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, keterampilan dan pengetahuan, masyarakat tentang isu permasalahan lingkungan dan nilai-nilai lingkungan yang pada akhirnya dapat menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya keselamatan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.

Mengembangkan kualitas SDM Masyarakat, yang aparatur pemerintah, murid sekolah meliputi guru, para ulama serta seluruh lapisan masyarakat sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh harus dilakukan melalui berbagai upaya reaktif dan proaktif. Upaya ini harus dilakukan oleh seluruh komponen bangsa sehingga generasi muda,

Pendidikan Lingkungan Hidup dibagi menjadi :

- 1) Pendidikan Lingkungan Hidup Formal adalah kegiatan pendidikan dibidang lingkungan hidup yang diselenggarakan melalui sekolah, terdiri atas pendidikan

dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dan dilakukan secara terstruktur dan berjenjang dengan metode pendekatan kurikulum yang terintegrasi maupun kurikulum yang monolitik (tersendiri)

- 2) Pendidikan Lingkungan Hidup nonformal adalah kegiatan pendidikan di bidang lingkungan hidup yang dilakukan di luar sekolah yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (misalnya pelatihan AMDAL,)
- 3) Pendidikan Lingkungan Hidup informal adalah kegiatan pendidikan di bidang lingkungan hidup yang dilakukan di luar sekolah dan dilaksanakan tidak terstruktur maupun tidak berjenjang
- 4) Kelembagaan Pendidikan Lingkungan Hidup adalah seluruh lapisan masyarakat yang meliputi pelaku, penyelenggaraan dan pelaksana Pendidikan Lingkungan Hidup, baik di jalur formal, nonformal dan informal.

Mendorong dan memberikan kesempatan kepada masyarakat memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang pada akhirnya dapat menumbuhkan kepedulian, komitmen untuk melindungi, memperbaiki serta memanfaatkan lingkungan hidup secara bijaksana, turut menciptakan pola perilaku baru yang bersahabat dengan lingkungan hidup, mengembangkan etika lingkungan hidup dan memperbaiki kualitas hidup.

Sesuai dengan tujuan Pendidikan Lingkungan Hidup, maka kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup di Indonesia disusun untuk menciptakan iklim yang mendorong semua pihak agar berperan dalam pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup untuk pelestarian lingkungan hidup.

3) Adanya upaya nyata untuk menangani kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi.

Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan dan segala keinginannya yang sangat variatif, pada umumnya tidak mempertimbangkan kemampuan dan daya dukung lingkungan terhadap aktivitas kehidupannya. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya pencemaran dan perusakan, yang pada giliran berikutnya mengandung timbulnya berbagai bencana, yang menghimpit kehidupan.

“Hasil wawancara bersama Sekretaris Kecamatan berkenaan isu Kesadaran lingkungan, sudah kita mulai dari kecamatan dengan memulai dengan hal-hal kecil dengan gerakan RT bersih di upayakan kerja bakti di desa minimal 2 Kali dalam sebulan dengan melibatkan instansi yang ada di kecamatan sesayap hilir.”

Upaya nyata untuk penyelamatan lingkungan pada masyarakat desa di kecamatan sesayap hilir

- 1) Pembuatan kebijakan daerah melindungi lingkungan hidup adalah bentuk nyata dari pemerintah dalam partisipasinya untuk menyelamatkan lingkungan.

kebijakan tersebut akan menjelaskan ketentuan mengenai hal-hal yang boleh dan yang tak boleh dilakukan terhadap lingkungan. Kebijakan tersebut juga mengandung sanksi terhadap pelanggarnya.

- 2) Membuang sampah pada tempatnya, hal sederhana tersebut seharusnya dapat dilakukan oleh semua orang/warga. Dengan membuang sampah pada tempatnya, kita dapat terhindar dari bencana seperti banjir. Dengan demikian marilah kita membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari bencana banjir.
- 3) Menghemat energi, menghemat energi nampaknya salah satu hal yang juga sering diabaikan oleh sebagian masyarakat, kita tau bahwa semakin menipisnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara yang selama ini menjadi bahan bakar penggerak mesin-mesin yang digunakan oleh manusia, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui tersebut lama-kelamaan juga akan habis apabila terus-menerus digunakan oleh manusia, oleh karena itu kita harus menghemat energi.
- 4) Memanfaatkan barang bekas agar dapat dimanfaatkan kembali, barang bekas yang sudah tidak berguna lagi

sebenarnya masih bisa dimanfaatkan untuk fungsi lain yang juga dapat digunakan oleh manusia. Ada yang langsung dapat digunakan kembali dan ada yang harus dirombak sedikit agar dapat digunakan. Barang bekas yang langsung dapat digunakan kembali dengan fungsi lain adalah kaleng bekas susu, kaleng tersebut dapat digunakan sebagai pot tanaman. Mengingat fungsi kaleng susu adalah sebagai wadah susu, tetapi karena fungsi sebagai wadah susu tidak berfungsi lagi, sehingga kaleng susu yang telah kosong tersebut dialihfungsikan sebagai pot tanaman. Intinya tetap kita dapat meminimalisir sampah rumah tangga.

- 5) Menanam pohon dan menghindari bahan-bahan yang dapat merusak lingkungan, ini adalah cara yang simple dan dapat dilakukan oleh setiap masyarakat guna menciptakan sinergi bersama pemerintah demi tercapainya lingkungan yang sehat. Jika setiap bangunan menanam minimal 2 pohon maka, saya dapat menjamin bahwa emisi CO₂ akan berkurang karena emisi CO₂ yang dapat menimbulkan hujan asam itu akan diserap oleh tumbuhan sebagai bahan fotosintesis.

- 6) Semua orang yang peduli pada permasalahan lingkungan hidup, pentingnya sinergi antara aktor dalam melindungi lingkungan hidup. Aktor-aktor yang diharuskan untuk bersinergi tersebut bisa merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi pecinta lingkungan hidup, masyarakat, ataupun pihak swasta. Hanya mengharapkan salah satu aktor saja dalam melindungi lingkungan hidup, sudah pasti akan membutuhkan perjuangan yang sangat berat.

permasalahan lingkungan hidup yang banyak menjadi sorotan adalah permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di tingkat desa. Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di tingkat desa tersebut pada umumnya adalah justru karena tidak adanya sinergi antar aktor. Sebaliknya, yang terjadi adalah pertarungan kepentingan antar aktor, seperti pertarungan kepentingan antara pihak swasta dan masyarakat desa.

Jika ada kerja sama, mungkin aktor-aktor tersebut telah terbagi ke dalam dua kubu, yaitu kubu yang membela pihak swasta yang hendak membangun usaha besar, dan kubu yang membela pihak masyarakat desa yang hendak mempertahankan lahan dan lingkungan hidup di desa tersebut. Pertarungan kepentingan di

tingkat desa tersebut dapat kita lihat dalam kasus terjadi dikecamatan sesayap hilir.

D. Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman.

Dalam upaya pembangunan desa terpencil dan percepatan desa tertinggal tidaklah luput dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, pembahasan tentang kinerja pembangunan desa dilakukan dengan mengacu pada wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai berikut;

1. Kekuatan

Kekuatan yaitu situasi ataupun kondisi yang merupakan gambaran kekuatan dari suatu organisasi yang bisa memberikan pengaruh positif dalam melakukan pembangunan desa pada saat ini ataupun masa yang akan datang.

a) Sumber daya alam yang melimpah,

Pada dasarnya sumber daya alam merupakan asset yang dimiliki suatu daerah yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim atau cuaca, hasil hutan, tambang dan hasil laut yang sangat mempengaruhi pertumbuhan industri suatu daerah, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. Dengan adanya sumber daya alam yang melimpah dan berpotensi tinggi sangat mendukung pembangunan desa terpencil dan tertinggal.

Berdasarkan profil Kecamatan Sesayap Hilir 2017 Sektor unggulan dan komoditas unggulan yang dimiliki oleh Kecamatan yaitu :

- 1) Sektor Pertanian, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;
- 2) Sektor Pertambangan (batu bara).

Mengingat sebagian besar wilayah Sesayap Hilir berupa lahan pertanian maka saat ini dan masa yang akan datang sektor ini akan menjadi salah satu sektor unggulan yang diunggulkan. Saat ini sektor pertanian merupakan sektor penyumbang terbesar terhadap pembentukan produk Domestik Region Bruto (PDRB).

b) Terjalinya hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat

Keterbukaan informasi publik pemerintah yang transparan mampu membentuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi yang memberikan informasi yang aktif akan membantu terciptanya hubungan yang harmonis antara badan publik seperti pemerintah daerah kepada masyarakat, dengan pemerintah membuka informasi ini tersebut adalah cara yang populer di dunia untuk menerima umpan balik dari

masyarakat, bentuk keterbukaan informasi publik pemerintah yaitu melalui transparansi data, hal tersebut sudah dapat dilihat dari adanya website pada masing masing SKPD yang dikelola oleh SKPD dengan data-data yang lengkap, sehingga mempermudah masyarakat untuk mengetahui informasi tentang program pemerintah.

c) Masyarakat sudah mulai terbuka dengan adanya pembangunan

Berbagai rencana pembangunan yang dimiliki pemerintah semestinya sudah mulai mengajak partisipasi masyarakat. Karena tanpa didukung peran serta masyarakat, pembangunan yang dilaksanakan akan menjadi kurang efektif. Sikap masyarakat yang terbuka dengan adanya program pembangunan desa akan memberikan nilai positif bagi desa itu sendiri.

d) Mulai beragamnya aktifitas perekonomian di desa /kecamatan

Untuk desa terpencil dan tertinggal jenis aktifitas ekonominya sangat terbatas sehingga untuk memenuhi kebutuhan dan jasa yang diinginkan akan terasa sulit, salah satu indikator melihat suatu desa berkembang menjadi maju adalah beragamnya aktifitas ekonomi di suatu desa, sehingga tidak saja mudah mendapatkan kebutuhan tetapi banyak

pilihan untuk usaha seperti pertanian, pertambangan, perindustrian, pengangkutan, perdagangan dan jasa-jasa lainnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

e) Telah dibukanya perbankan di Kecamatan Sesayap Hilir

Peranan perbankan di kecamatan tentunya memberikan dampak yang positif bagi kecamatan tersebut, karena keberadaan bank tersebut akan menghimpun atau memobilisasi dana yang menganggur dari masyarakat dan perusahaan-perusahaan kemudian disalurkan ke dalam usaha-usaha yang produktif untuk berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, pertambangan, perindustrian, pengangkutan, perdagangan dan jasa-jasa lainnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Keberadaan bank akan membuka dan memperluas lapangan atau kesempatan kerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang menganggur di dalam masyarakat. Kegiatan dalam pemberian jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dapat membantu memperbesar dan memperlancar arus barang-barang dan jasa-jasa dalam masyarakat.

Peranan Bank juga dalam pembagian pendapatan masyarakat dalam kebijakan pemberian kredit bank mempunyai peranan yang sangat penting karena turut menentukan pembagian pendapatan masyarakat. Kredit

merupakan sarana yang ampuh bagi mereka yang memperolehnya, sebab dengan memperoleh kredit seseorang dapat menguasai faktor-faktor produksi untuk kegiatan usahanya. Makin besar kredit yang diperoleh, makin besar pula faktor produksi yang dikuasai, sehingga makin besar pula bagian pendapatan masyarakat yang dapat diraihinya. Sehubungan dengan itu melalui sistem perbankan yang kita miliki dan kebijakan perkreditan yang tepat bank dapat melaksanakan fungsinya dalam membantu pemerintah untuk pemeratakan kesempatan berusaha dan pendapatan di dalam masyarakat. Dengan demikian kita dapat turut mewujudkan masyarakat yang kita cita-citakan, yaitu masyarakat maju.

f) Aparatur kecamatan memiliki sumber daya manusia (SDM) yang baik.

Dalam suatu organisasi, sumber daya manusia bukan hanya sebagai alat dalam mencapai tujuan tetapi memiliki peran penting dalam kegiatan suatu organisasi akan tetapi juga sebagai penggerak dan penentu berlangsungnya proses kegiatan dan segala aktivitas organisasi. SDM memiliki andil besar dalam menentukan maju atau berkembangnya suatu organisasi. Oleh karena itu, kemajuan suatu organisasi

ditentukan pula bagaimana kualitas dan kapabilitas SDM di dalamnya.

sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kapabilitas dalam memberikan pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat dan memajukan daerahnya dengan meningkatkan daya saing daerah. Dalam upaya mengupayakan percepatan pembangunan desa diperlukan SDM yang mampu memahami bagaimana menciptakan metode pembangunan desa yang tepat sehingga dicapai pembangunan desa sesuai dengan kareakter masyarakat setempat dan mampu melihat potensi yang dimiliki daerah kemudian menciptakan inovasi dalam memanfaatkan potensi daerah.

Di era otonomi daerah, dimana kewenangan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan terutama pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang sudah diberikan kepada daerah agar masing-masing daerah berlomba-lomba untuk memajukan daerahnya.

2. Kelemahan/Hambatan

Hambatan yaitu situasi ataupun kondisi yang merupakan gambaran hambatan dari suatu organisasi/pemerintah yang bisa memberikan pengaruh negatif dalam melakukan pembangunan desa pada saat ini.

a) Sumber daya lahan terbatas.

Keberadaan lahan di desa untuk melakukan kegiatan pertanian sangatlah penting, karena merupakan salah satu tempat masyarakat mendapatkan penghasilan, untuk wilayah kecamatan sesayap hilir terdapat permasalahan berkenaan lahan, dimana sebagian besar lahan yang produktif ternyata telah dikuasai perusahaan swasta, selaku pemegang izin yang sah yang di terbitkan oleh pemerintah pusat dan daerah, sedangkan masyarakat mendapatkan sebagian kecil, ada pun konsekuensi bagi masyarakat melakukan aktifitas di daerah tersebut merupakan suatu pelanggaran.

Pemerintah kecamatan tidak bisa berbuat banyak berkenaan hal ini, namun pemerintah kecamatan tetap melakukan koordinasi pihak perusahaan agar dapat melepaskan sebagian kawasan mereka untuk lahan kehidupan bagi masyarakat, dan melepaskan lahan tersebut apa bila terdapat tanam tumbuh lahan tersebut, pemerintah juga memberikan fasilitasi pertemuan terhadap perusahaan dan pemerintah desa untuk melaksana pertemuan dalam hal pengelolaan lahan tersebut.

b) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) rendah

Sebagian besar masyarakat maupun aparatur pemerintahan desa. Memiliki tingkat pendidikan rendah, berkaitan terhadap keterbatasan kualitas sumber daya manusia dengan

keterampilan masyarakat, dengan tingkat kualitas sumberdaya manusia rendah maka dengan sendirinya keterampilannya juga rendah, pola pikir juga akan berbeda. Dengan kualitas sumberdaya manusia rendah akan menjadi salah satu penghambat pembangunan desa.

c) Partisipasi masyarakat

Dalam upaya pembangunan desa saya melihat partisipasi masyarakat di kecamatan sesayap hilir masih kurang. Partisipasi masyarakat merupakan syarat untuk terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam pembangunan, partisipasi menyebabkan terjalinnya kerjasama dalam pembangunan desa. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam usaha terselenggaranya pembangunan, partisipasi masyarakat didasarkan atas kemauan diri sendiri artinya masyarakat desa ikut serta dalam pembangunan atas dasar keyakinan dan kesadaran yang datang dari dalam diri mereka sendiri. Agar upaya pembangunan desa memenuhi apa yang diinginkan maka diperlukan suatu perencanaan, penerapan perencanaan pembangunan harus bersumber pada prinsip dasar pembangunan daerah yaitu dari, oleh, dan untuk masyarakat daerah itu sendiri.

Oleh karena hal tersebut diperlukan kemampuan masyarakat untuk mengenali dan memecahkan segala permasalahan yang ada didalam wilayah tersebut serta dapat menggali potensi-potensi yang ada untuk selanjutnya dimanfaatkan dalam kegiatan pembangunan. Pasrtisipasi masyarakat sangat diperlukan terutama dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang ada sehingga nantinya pembangunan yang akan dilaksanakan benar-benar merupakan kebutuhan dari masyarakat. Dengan kualitas partisipasi masyarakat rendah akan menjadi salah satu penghambat pembangunan desa.

d) Pengawasan/kontrol pemerintahan masih lemah.

Pengawasan bagi pemerintah daerah, supaya mereka bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efesien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup pengawasan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi: a) administrasi pemerintahan desa dan b) urusan pemerintahan desa. Pengawasan yang dimaksud meliputi: 1) Kebijakan desa, 2) kelembagaan desa, 3) keuangan desa dan 4) kekayaan desa.

Pengawasan terhadap pemerintah desa dilakukan oleh pejabat pengawas pemerintah pada Inspektorat kabupaten/kota.

Salah satu fakta di lapangan Misalnya, alokasi dana desa (ADD), jarang disentuh oleh namanya pemerikasaan secara keseluruhan, dari para pengawas, apalagi dana hasil penerimaan dari pihak swasta ke pihak desa. Sehingga peluang disalahgunakan jauh lebih besar. Pengawas untuk pemerintah desa sepertinya jarang turun. Apalagi pengawasan dari lembaga sosial masyarakat (LSM) juga tidak dilakukan, karena masyarakat desa yang notabenenya memiliki tingkat pendidikan yang rendah tidak tahu menahu cara melakukan pengawasan.

e) Lemahnya kelembagaan desa.

Lembaga merupakan fenomena yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, bukan saja karena fungsinya untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai yang sangat tinggi dalam masyarakat, melainkan juga berkaitan erat dengan pencapaian berbagai kebutuhan manusia. Maka lembaga merupakan sarana untuk mencapai kebutuhan manusia. lembaga desa memiliki peranan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat, termasuk desa. Secara umum dalam

suatu masyarakat, lembaga-lembaga yang sangat penting perannya dalam kehidupan masyarakat.

Lembaga yang ada di desa kebanyakan tidak aktif, seperti LPM, BPD Pemuda Desa dll, biasanya pertemuan dilakukan ketika masa periode kepengurusan sudah habis, sedangkan fungsinya membantu pemerintah desa dan penyeimbang tidak berfungsi dengan baik.

3. **Peluang/Dukungan**

Peluang/dukungan yaitu situasi ataupun kondisi yang merupakan gambaran peluang dari sisi luar suatu organisasi/pemerintah dalam melakukan pembangunan desa.

a) Adanya dukungan kebijakan dari pemerintah daerah dalam pembangunan desa

Arah kebijakan pemerintah daerah saat ini mendukung dengan upaya pembangunan desa yaitu dengan mengupayakan peningkatan pembangunan infrastruktur desa juga mengupayakan meningkatkan perekonomian di desa, salah satu kebijakan yang di ambil adalah seluruh desa se-Kabupaten tidak hanya mendapatkan dana desa (DD) dari pemerintah pusat, tetapi juga mendapatkan Anggaran Dana Desa (ADD) yang bersumber dari dana sering pemerintah kabupaten yang begitu besar, sudah mulai di berikan 8 tahun yang lalu.

b) Banyaknya perusahaan swasta yang berinvestasi di wilayah Kecamatan Sesayap Hilir.

Keberadaan perusahaan akan memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Utamanya dalam hal penyediaan lapangan kerja, sehingga masyarakat sekitar bisa berkontribusi langsung dan mengambil manfaat dari keberadaan perusahaan. Selain dapat membuka lapangan kerja perusahaan juga saat ini dapat bertanggung jawab sosialnya atau Corporate Sosial Responsibility (CSR) juga dapat digunakan dalam pembangunan desa dan secara mikro berdampak pada perekonomian desa di sekitar perusahaan-perusahaan itu.

4. Ancaman/ Tantangan

Tantangan yaitu situasi ataupun kondisi yang merupakan gambaran Ancaman/tantangan dari suatu organisasi/pemerintah dalam melakukan pembangunan desa.

a. Permasalahan semakin kompleks

Salah satu indikator suatu daerah mulai terasa maju adalah banyaknya masalah yang timbul, biasanya kasusnya , jarang terjadi hanya beberapa jenis kejahatan saja, sekarang terjadi banyak kasus yang di tangani yaitu narkoba, kasus sengketa lahan/watas, pencurian, minuman keras, perkelahian dll.

b. Kurang memadai prasarana dan sarana yang tersedia tentunya menjadi tantangan dalam pembangunan desa.

Prasarana dan sarana (*infrastructure*) sering diartikan sebagai bangunan fisik untuk kesejahteraan dan keselamatan umum (seperti jalan, pelabuhan, bandara, tenaga listrik, telekomunikasi, irigasi, air bersih, dan sanitasi), merupakan prasyarat agar berbagai aktivitas masyarakat dapat berlangsung. Infrastruktur memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan bahkan sosial-politik (sebagaimana diindikasikan oleh daerah yang mempunyai kelengkapan sistem infrastruktur yang lebih baik dan stabilitas sosial politik yang baik).

Dalam konteks ekonomi, infrastruktur merupakan “social overhead capital” dan terlihat sebagai katalisator diantara proses produksi, pasar, dan konsumsi akhir. Keberadaan infrastruktur dapat memberikan gambaran tentang kemampuan memproduksi masyarakat, dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pembangunan infrastruktur merupakan kunci pertumbuhan ekonomi. Penyediaan infrastruktur baik yang berupa penyediaan prasarana dan sarana transportasi, pengairan, bangunan fasilitas umum (*public services*) merupakan salah satu faktor yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

c. Beralinya Profesi penghidupan Masyarakat Desa

Sebagian besar masyarakat desa meninggalkan pekerjaan lama sebagai petani dan nelayan, lebih memilih sebagai karyawan perusahaan swasta, yang berakibat kebutuhan pokok, serta sayur dan ikan, sekarang didatangkan dari luar daerah lain, ketergantungan bisa dilihat dengan sering langkanya bahan pokok, sehingga mengakibatkan harga yang tidak setabil.

E. Upaya Pemerintah Kecamatan Dalam Menanggulangi Hambatan (Kelemahan, Ancaman).

Wawancara dengan Sekretaris Camat disampaikan bahwa upaya yang dilakukan dalam menanggulangi hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan pembangunan desa terpencil dan percepatan desa tertinggal adalah

1. Penanggulangan Kelemahan

a. Sumber daya lahan terbatas.

Diupayakan untuk melakukan progres pemetaan dan pendataan kawasan produktif milik masyarakat yang masuk dalam peta produksi perusahaan, kedepannya dilakukan upaya untuk melakukan koordinasi kepada Kementrian Kehutanan agar dapat dikeluarkan dari peta kawasan industri menjadi kawasan non industri dalam setiap tahunnya. Hasilnya Sebagian

wilayah lahan kehidupan masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan produksi sudah dikeluarkan menjadi hutan non produksi dan sebagian desa diserahkan lahan kehidupan untuk masyarakat oleh pihak perusahaan.

b. Kualitas sumber daya manusia rendah,

Mengupayakan peningkatan sumberdaya manusia secara terus menerus yang berkelanjutan, melalui program-program pelatihan, bimbingan teknis, kursus yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat tentunya sesuai dengan potensi dan usaha yang di jalankan. Program-program upaya peningkatan sumberdaya manusia terealisasi dengan baik dilaksanakan oleh pemerintah Desa pemerintah Kecamatan maupun OPD yang ada di Kabupaten.

c. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih kurang.

Partisipasi merupakan hal yang penting bagi pembangunan desa untuk itu perlu digalakan secara terus menerus. Rendahnya partisipasi masyarakat bisa disebabkan rasa kekecewaan yang di rasakan masyarakat karena beberapa usulan dari tahun ketahun yang di usulkan melalui musrembang desa belum terealisasi, untuk itu dibutuhkan komunikasi yang intens antara pemerintah daerah, kecamatan dan desa sehingga

usulan yang ada bisa cepat di realisasikan. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah mengagendakan pertemuan tiap bulannya antara camat, kepala desa, lembaga desa dan pimpinan instansi yang ada di kecamatan. Dalam pertemuan tersebut terdapat nilai yang baik, salah satunya yaitu; komunikasi antar desa, lembaga desa dan pemerintah daerah bisa berjalan baik, kendala atau permasalahan yang dihadapi bisa cepat teridentifikasi dan terselesaikan.

d. Lemahnya kelembagaan desa

Kehadiran kelembagaan merupakan penggerak bagi masyarakat, dengan aktifnya kelembagaan desa, akan berdampak pada partisipasi masyarakat meningkat. Meringankan kerja pemerintah desa, untuk itu pemerintah mengupayakan agar lembaga desa dapat berperan aktif dimulai dengan pembinaan secara bertahap dan mengupayakan lembaga desa yang ada diberikan dana operasional yang besar tiap tahunnya, kelembagaan kalau tidak ada dana, juga akan terasa berat.

e. Pengawasan/kontrol pemerintah masih lemah.

Dalam upaya pengawasan pemerintah kecamatan yaitu memastikan program-program desa di sesuaikan dengan RPJM desa yang disinkronkan dengan visi dan misi pemerintah

Kabupaten. Dokumen RPJMDes diserahkan pada kecamatan, dan setiap pencairan tahapan dana ADD dan DD mesti melewati tim verifikasi kecamatan.

2. Menghadapi Ancaman

1) Permasalahan semakin kompleks

Untuk permasalahan yang akan datang tentunya akan semakin kompleks untuk itu dari mulai sekarang pemerintah kecamatan berupaya melakukan tindakan pencegahan-pencegahan, dengan melakukan studi banding dengan wilayah yang deluan lebih maju dari wilayah Kecamatan Sesaap Hilir.

2) Kurang memadai prasarana dan sarana yang tersedia

Dari beberapa prasarana yang ada, prasarana dasar yang belum terpenuhi, untuk itu perlu dilakukannya koordinasi yang lebih intens kepada pihak dinas terkait maupun kepada perusahaan untuk melakukan pembangunan kebutuhan dasar desa dengan mengutamakan sekala prioritas atau dengan sistem pembangunan bersama antara pemerintah dan pihak swasta.

3) Beralinya profesi penghidupan masyarakat desa.

Kecamatan dan desa berkerjasama untuk menghidupkan lagi kelompok usaha bersama (Kube) yang telah terbentuk, dengan memberikan perhatian khusus, dari mulai

peningkatan sdm, membantu pemasaran hasil produksi usaha, hingga sampai dengan penampungan hasil produksi masyarakat.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisa dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

- 1. Kinerja pembangunan desa terpencil hal ini dilihat dari indikator.** Tersedianya prasarana dan saran aksesbillitas. Pencapaian pembangunan prasarana jalan dan dermaga di Kecamatan Sesayap Hilir, sampai saat ini belum optimal pembangunan aksesbillitas dilakukan namun masih terasa lambat.
- 2. Kinerja percepatan pembangunan desa tertinggal meliputi;** (1) Tersedianya infrastruktur fisik dan sosial, (2) Terlaksananya pembangunan ekonomi, (3) Terciptanya kelestarian lingkungan. Sampai saat ini belum optimal, dari 3 (tiga) indikator di atas belum terpenuhi sepenuhnya.
- 3. Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancama yang ditemui di Lapangan**
 - a. Terdapat 6 (enam) faktor kekuatan, pelaksanaan pembangunan desa yaitu;**
 - 1) Sumber daya alam yang melimpah
 - 2) Terjalinya hubungan yang harmonis antara pamarintah dan masyarakat

- 3) Masyarakat sudah mulai terbuka dengan adanya pembangunan
- 4) Mulai beragamnya aktifitas perekonomian di desa /Kecamatan
- 5) Telah dibukanya perbankan di Kecamatan Sesayap Hilir
- 6) Aparatur Kecamatan dan Desa Memiliki SDM baik.

b. Terdapat 5 (lima) faktor Kelemahan/hambatan, pelaksanaan pembangunan desa yaitu;

- 1) Sumber daya lahan terbatas.
- 2) Kualitas SDM rendah
- 3) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih kurang.
- 4) Pengawasan/kontrol pemerintahan daerah masih lemah.
- 5) Lemahnya lembaga desa.

c. Terdapat 2 (dua) faktor Peluang/dukungan, pelaksanaan pembangunan desa yaitu;

- 1) Adanya dukungan kebijakan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pembangunan desa
- 2) Banyaknya perusahaan swasta yang berinvestasi di wilayah Kecamatan Sesayaps Hilir

d. Terdapat 3 (tiga) faktor Ancaman/tantangan, pelaksanaan pembangunan desa yaitu;

- 1) Permasalahan semakin kompleks
- 2) Kurang memadai prasarana dan sarana yang tersedia tentunya menghambat pembangunan desa
- 3) Beralinya profesi penghidupan masyarakat desa

4. Upaya pemerintah Kecamatan Sesayap Hilir dalam menanggulangi Kelemahan /hambatan dan Ancaman.

a. Terdapat 5 (lima) penanggulangan kelemahan/hambatan pelaksanaan pembangunan desa yaitu;

- 1) Sumber daya lahan terbatas, pendataan kawasan produktif milik masyarakat yang masuk dalam peta produksi untuk melakukan koordinasi kepada kementerian kehutanan agar dapat dikeluarkan dari peta kawasan industri
- 2) Kualitas sumber daya manusia rendah, mengupayakan peningkatan sumberdaya manusia secara terus menerus yang berkelanjutan. melalui program-program pelatihan, bimbingan teknis.
- 3) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih rendah, diupaya yang dilakukan pemerintah adalah mengagendakan pertemuan tiap bulannya antara camat,

kepala desa, lembaga-lembaga desa dan pimpinan instansi yang ada di kecamatan.

- 4) Lemahnya kelembagaan desa, mengupayakan agar lembaga desa dapat berperan aktif dimulai dengan pembinaan secara bertahap dan mengupayakan lembaga desa yang ada diberikan dana oprasional yang setiap tahunya
 - 5) Pengawasan/kontrol pemerintahan mendapatkan masih lemah. mengupayakan pegawasan pemerintah daerah/kecamatan yaitu memastikan program-program desa di sesuaikan dengan RPJMdesa yang disinkronkan dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten. Dokumen RPJMDes diserahkan pada Kecamatan, dan setiap pencairan tahapan dana ADD dan DD mesti melewati tim verifikasi kecamatan.
- b. Terdapat 3 (tiga) penanggulangan ancaman/tantangan pelaksanaan pembangunan desa yaitu;
- 1) Permasalahan semakin kompleks, melakukan studi banding dengan wilayah yang deluan lebih maju dari wilayah kecamatan sesyaap hilir, agar mendapatkan pemahaman pencegahan sebelum permasalahan muncul.
 - 2) Kurang memadai prasarana dan sarana yang tersedia, dilakukannya koordinasi yang lebih intens kepada pihak dinas terkait maupun kepada perusahaan untuk

melakukan pembangunan kebutuhan dasar desa dengan mengutamakan sekala prioritas atau dengan sistem pembangunan bersama antara pemerintah dan pihak swasta.

- 3) Beralinya profesi penghidupan masyarakat desa, yaitu dari sektor pertanian menjadi buruh swasta. Untuk itu pemerintah mengupayakan memberikan perhatian khusus, dari mulai peningkatan sdm, produksi, membantu pemasaran hasil produksi usaha, hingga sampai dengan penampungan hasil produksi masyarakat.

B. Saran

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi desa, dan terciptanya kelestarian lingkungan.

Kecamatan Sesayap Hilir dituntut agar mengoptimalkan potensi yang ada agar pembangunan desa terpencil dan tertinggal di kecamatan sesayap hilir dapat menjadi desa maju dan mandiri. Oleh karena itu dengan memperhatikan faktor hambatan dan tantangan maka disarankan untuk;

1. Saran teoritis

- a) Memprioritaskan peningkatan sumber daya manusia karena manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari semua upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan.
- b) Pengembangan kapasitas masyarakat individu maupun kelembagaan yang ada di desa dan sebagainya, dengan meningkatkan kemampuan ketrampilan dan memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan dan spiritual.
- c) Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi dan potensi yang dimiliki.
- d) Pentingnya komunikasi yang baik karena komunikasi mempunyai peran yang sangat penting, karena kegagalan dari program ataupun proyek pembangunan pedesaan antara lain disebabkan karena program maupun proyek tersebut tidak dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat, karena melalui komunikasi dapat menciptakan partisipasi dan rasa memiliki dikalangan masyarakat pedesaan.
- e) Pemantapan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan, pengelola data, monitoring dan evaluasi pembangunan desa.

2. Saran praktis

Dari penelitian kinerja pembangunan desa terpencil dan percepatan pembangunan desa tertinggal dapat disarankan sebagai berikut;

- a. Pelaksanana pembangunan desa terpencil dan percepatan pembangunan desa tertinggal perlu menerapkan manajemen kinerja dalam pemerintah desa dengan cara merancang, mengelola meningkatkan dan mengembangkan kinerja seluruh perangkat desa melalui tahapan secara sistimatik.
- b. Dalam rangka optimalisasi kinerja pembangunan desa oleh pemerintah desa dan pemerintah Kecamatan Sesayap Hilir sehingga terwujudnya desa yang maju dan mandiri maka pembangunan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan kehendak masyarakat setempat secara luas.
- c. Kinerja Pembangunan desa terpencil di Kecamatan Sesayap Hilir perlunya mengutamakan pembangunan prasarana jalan penghubung dan dermaga yang tidak hanya di gunakan oleh penumpang melaikan juga bisa di gunakan untuk bongkar muat barang-baran disemua desa.
- d. Diupayakan kinerja percepatan pembangunan desa tertinggal dengan memenuhi kebutuhan dasar air bersih dan listrik masyarakat desa dapat terpenuhi bisa dengan membangun embung-embung di desa.

- e. Minimnya lahan kehidupan masyarakat, pemerintah desa dapat melakukan progres pemetaan dan pendataan kawasan produktif, non produktif milik masyarakat yang masuk dalam peta produksi perusahaan untuk melakukan koordinasi kepada perusahaan maupun kepada kementerian kehutanan agar dapat dikeluarkan dari peta kawasan industri menjadi kawasan non industri agar tetap bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
- f. Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa pemerintah desa dan kecamatan dapat dilakukan pelatihan, bimbingan teknis, kursus yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat tentunya sesuai dengan potensi dan usaha yang dijalankan.
- g. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih kurang untuk itu diperlukan upaya sosialisasi menjelaskan pentingnya pembangunan pedesaan, pendampingan pada masyarakat dengan memberikan pelatihan dan keterampilan yang menyangkut dalam pembangunan pedesaan dan melakukan penguatan kelembagaan agar menjadi penggerak bagi masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan.
- h. Penguatan kelembagaan, dengan memberikan pelatihan tentang pengorganisasian, pengelolaan keuangan, dan administrasi kantor yang baik agar lembaga desa dapat dikelola secara efektif dan efisien. Memonitor perkembangan hasil dalam aspek oprasional, finansila dan administrasi yang dicapai.

- i. Dalam upaya pengawasan pemerintah kecamatan yaitu memastikan program-program desa di sesuaikan dengan RPJMdesa yang disinkronkan dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten. Dan memastikan tahapan pengusulan dan perengkingan berjalan sesuai dengan petunjuk yang ada.
- j. Perlunya dilakukan penambahan-penambahan personil pendamping desa guna membantu dasa dalam menjalankan dan mengelolah pemerintah desa dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo “*Membangun Desa Partisipatif*” Graha Ilmu Yogyakarta”. 2006
- Adisasmita, Rahardjo “*Pembangunan Perdesaan* Graha Ilmu Yogyakarta”. 2013
- Anwar, Sitepu, “*Konstruksi Lembaga Kesejahteraan Sosial Untuk Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan*”. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Volume 16 No. 1 Januari – April 2011.
- Amos, Neolaka, Kesadaran Lingkungan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008),
- Agustin, Mery, “*Pertisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa melalui musrembang*” Diakses melalui <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/viewFile/13950/12737>. 2011
- Almasdi, Syahza dan Suarman, “*Strategi pembangunan daerah tertinggal dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi pedesaan*”, Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 14 Nomor 1, Juni 2013,
- A.Helmy Faishal Zaini. “*Pembangunan Pedesaan*”, Diakses melalui; (<http://19.uhamzah.web.id/id3/2823-2721>). 2013
- Andarurahutomo, *Teori Analisa SWOT* Diakses melalui; http://andarurahutomo.blogspot.com/2016/07/teori-analisis-swot_21.html .21 Juli 2016
- Chalid Pheni, “*Teori dan Isu Pembangunan*” Tangerang Selatan Universitas Terbuka. 2015
- Elsa, “*Stratrgi Pengembangan Desa Tertinggal di Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Juaya Keputatrn Solok*. Diakse, melalui; (<https://www.neliti.com/id/publications/131498>). 2017
- Gunawan, “*Peran dan Fungsi Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah*. Diakses melalui (<https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.315-328>.) 2014.
- Hamdi, Muchlis & Ismaryati, Siti, “*Metode Penelitian* ”, Tangerang Selatan Universitas Terbuka. 2016 .

- Hendrawan, Daniel “*Analisi Yuridis Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Sebagai Bagian Dari Perwujudan Negara Kesejahteraan*”. Jurnal Institut Liemena, Pembangunan daerah Tertinggal. Vol.3 No.2 Okt 2011. Diakses, melalui: <http://www.leimena.org/id/page/v/548/>.
- Haeruman, 1997. *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*. Jakarta. LP3S.
- Hutjalu, Dedy, “*Dana Desa mengembalikan martabat desa Marsangap*”. Diakses melalui <http://ditjenpdt.kemendesa.go.id/news> 2018
- Idrus. Muhammad.”*Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*”, Jakarta : Erlangga 2009
- Ismail Nurdin, (2013) “*Urgensi Pelimpahan Kewenangan*” Diakses melalui ; <http://ismailnurdin.ipdn.ac.id>.2013
- J. Moleong. Lexy. “*Metode Penelitian Kualitatif*” Remaja Rosdakarya; Bandung. 2000.
- Kartasasmita, Ginandjar. 2001, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: Pustaka CIDESINDO.
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan, UPP STIM YKPN Yogyakarta*.
- Lukman Edy. “*Pencapaian Pembangunan Daerah Tertinggal Lima Tahun Terakhir*”. Jurnal Sekretariat Negara RI | No. 13 | Agustus 2009.
- Maya Rosalina, “*Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur*”. eJournal Pemerintahan Integratif, 2013, 1 (1): 106-120 ISSN 0000-0000 , Diakses melalui ejournal.pin.or.id.
- Margareta. Hensi “*Perbaikan Sistem Transportasi di Perdesaan di Era Otonomi Daerah*”. Makalah Geografi Transportasi Fakultas Geografi UGM. 2000
- Nuji “*Fungsi Camat, Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Muara Bengkal*”. eJournal Ilmu Pemerintahan, 2013. Diakses melalui ; <http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id>.
- Purwanto, Agus Joko & Elu, Wilfridus, “*Inovasi dan Prubahan Organisasi*” Tangerang Selatan Universitas Terbuka. 2016

- Purnamasari, Hanny & Ramdani, Ramdani Manajemen Pemerintahan dalam pembangunan desa di desa lemahambang kecamatan Lemahambang kabupaten Kerawang Jurnal Politikom Indonesia, VOL.3 NO e-ISSN : 2528 - 2069.1 JULI 2018 di akses <https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesia/article/download/1407/1162>
- Prasojo, Eko, "Pemerintah Daerah" Tangerang Selatan Universitas Terbuka. 2016.
- Priyo Sambodo, *Implementasi dana bantuan PT. Kideco Jaya Agung Dalam Pembangunan di Desa Sempulang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser* eJournal sllmu Pemerintahan, 2014, 2 (2): 2161-2173ISSN 2338-3651, di akses [ejournal.ip.fisip.unmul.ac .id](http://ejournal.ip.fisip.unmul.ac.id)© Copyright 2014.
- Purba, Justina Nuriati, *Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun (Studi tentang Program Bantuan Pembangunan Nagori / Kelurahan (BPN / K) Tahun 2008* di Akses <https://text-id.123dok.com/document.html>.
- Poerwadarminta W.J.S, "Peran Masyarakat Desa", Jakarta, PT. Bina Aksara. 1993
- Sanim, Bunasor "Sumberdaya air dan kesejahteraan Publik. Bogor IPB press. 2011.
- Satria "Definisi pembanguan desa menurut para ahli" Diakses melalui ; <http://www.materibelajar.id/2015/12>. 2015
- Syahza, Almasdi, "Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Melalui Pemberdayaan Koperasi Berbasis Agribisnis di Daerah Riau". Penelitian Fundamental DP2M. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. 2008.
- Suharyanto & Sofianto, Arif, "Model pembangunan desa terpadu inovatif di jawatengah". Diakses melalui <https://www.researchgate.net>. 2012.
- Sudirwo. D. (1981). *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*. Bandung: Aksara.
- Sugiyono. "Statistika Untuk Penelitian", Bandung, Alfabeta. 2001
- Sinungan, Muchdarsyah. "Produktivitas (Apa dan Bagaimana)". Jakarta : Bina Aksara. 1987
- Silalahi. Ulber. "Metode Penelitian Sosial". Bandung : Refika Aditama. 2009

- Uhamzah, "*Pembangunan Desa*" Diakse melalui (<http://19.uhamzah.web.id/id3/2823-2721>). 2014.
- Wahyudi, Ryo. *Defenisi Pembangunan Desa Menurut Para Ahli*, Diakses melalui; [http://lebungnala.blogspot.com/2017/09/inilah beberapa-definisi-pembangunan.html](http://lebungnala.blogspot.com/2017/09/inilah-beberapa-definisi-pembangunan.html)
- Wasistono, Sadu & Tahir, Irwan "*Prospek Pengembangan Desa*' Bandung Fokusmedia. 2007.

Dokumentasi perundang-undangan:

- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008; Tentang Kecamatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- Permendes Nomor 02 Tahun 2016) Tentang Indek Desa Membangun
- Peratudaran Daerah Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.
- Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan ,Tugas, Fungsi Dan Susuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.
- Profil Kecamatan Sesayap Hilir 2017
- Profil Kabupaten Tana Tidung 2017

Dokumen Wawancara

A. Kinerja pembangunan desa terpencil dan percepatan desa tertinggal yaitu

1. Menurut bapak bagaimana capaian pembangunan sarana dan prasarana plabuhan/dermaga di desa bapak
2. Menurut bapak bagaimana capain pembangunan sarana dan prasarana transfortasi jalan darat di desa.
3. Menurut bapak, seberapa pentingkah pembangunan prasaranan dan sarana transfortasi bagi desa.
4. Menurut bapak apa kendala yang dihadapi dalam melakukan pembangunan desa
5. Apa upaya pemerintah dalam menangulangi hambatan dan tantangan pembangunan desa.
6. Bangimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
7. Bagaimana hubungan desa dengan pemerintah daerah (kecamatan)
8. Apakah lembaga desa yang ada berfungsi dengan baik.

B. Kinerja percepatan pembangunan desa tertinggal

a. Terpenuhinya sarana dasar (Air bersih, Listrik)

- 1) Apakah prasarana dan sarana dasar (air bersih, listrik) sudah terpenuhi di desa ?
- 2) Apa hambatan dan tantangan terkait kinerja pembangunan desa terpencil dan percepatan desa tertinggal.

- 3) Apa upaya pemerintah dalam menanggulangi hambatan dan tantangan dalam pembangunan desa tertinggal dan percepatan desa tertinggal

b. Tersedianya sarana ekonomi (pasar, pertokoan,pkl,industri)

- 1) Apakah prasarana dan sarana ekonomi sudah terpenuhi di desa ?
- 2) Apa hambatan dan tantangan terkait pembangunan desa terpencil dan percepatan desa tertinggal di sektor perekonomian
- 3) Apa upaya pemerintah dalam menanggulangi hambatan dan tantangan dalam pembangunan desa tertinggal dan percepatan desa tertinggal
- 4) Apakah masyarakat pelaku aktif dalam kegiatan pasar,pkl, toko maupun industri.

c. Tersedianya sarana sosial (Kesehatan dan Pendidikan)

- 1) Apakah prasarana dan sarana sosial sudah terpenuhi di desa ?
- 2) Apa hambatan dan tantangan terkait kinerja pembangunan desa percepatan desa tertinggal.
- 3) Apa upaya pemerintah dalam menanggulangi hambatan dan tantangan dalam pembangunan desa tertinggal dan percepatan desa tertinggal

d. Meningkatnya perekonomian masyarakat desa

- 1) Apa saja sumber-sumber pendapatan masyarakat desa bapak ?
- 2) Pada sektor pertanian, bagaimana menurut bapak hasil pertanian sekarang ini seperti ; Beras, Palawija, Sayur
- 3) Pada sektor perikanan bagaimana menurut bapak hasil perikanan sekarang ini yaitu ; Laut, Sungai
- 4) Pada sektor perkebunan bagaimana menurut bapak hasil perkebunan masyarakat, seperti kebun sawit atau kebun buah?
- 5) Pada sektor pertambangan, menurut bapak berkenaan dengan hasil sekarang ini ?
- 6) Pada sektor peternakan, menurut bapak berkenaan dengan hasil sekarang ini ?
- 7) Bagaimana prasaranan ekonomi di desa bapak
- 8) Apa hambatan dan tantangan terkait kinerja pembangunan desa di sektor ekonomi di desa terpencil dan percepatan desa tertinggal.
- 9) Apa upaya pemerintah dalam menanggulangi hambatan dan tantangan dalam pembangunan desa terpencil dan percepatan desa tertinggal.

e. Terciptanya kelestarian lingkungan meliputi ;

- 1) Seberapa besar akan arti pentingnya lingkungan bagi masyarakat.
- 2) Bagaimana perkembangan kepedulian lingkungan semua pihak

- 3) Upaya nyata apa yang telah dilakukan masyarakat desa untuk menjaga lingkungan.

C. Kekuatan

1. Apa saja potensi sumber daya alam yang dimiliki wilayah kecamatan sesayap hilir
2. Apakah terjalinnya hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat
3. Apakah Masyarakat sudah mulai terbuka dengan adanya pembangunan desa
4. Seberapa banyaknya jenis aktifitas perekonomian di kecamatan
5. Bagaimana Sistem birokrasi pemerintah kecamatan dan pemerintah desa apa sudah berjalan dengan baik.

D. Hambatan

1. Sumber daya lahan terbatas.
2. Kualitas SDM rendah baik masyarakat maupun aparatur pemerintahan desa.
Bagaimana cara untuk meningkatkan sdm dan sda kecamatan sesayap hilir
3. Partisipasi dalam pembangunan desa masih kurang.
Menurut ibu, bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa /kegiatan musrembang
4. Pengawasan/kontrol pemerintahan belum ada.
5. Lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat.

Apakah pemerintah melakukan pembinaan kepada lembaga desa

6. Banyaknya penduduk miskin.
7. Rendahnya akses jalan produksi.
8. Ketergantungan masyarakat terhadap SDA masih tinggi.
9. Pemanfaatan IPTEK masih rendah.

Apakah para petani /nelayan menggunakan teknologi

E. Dukungan

1. Adanya dukungan kebijakan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pembangunan desa
2. Berapa banyak perusahaan swasta yang berinvestasi di wilayah kecamatan sesayap hilir.
3. Seberapa besar dampak dari perusahaan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat

F. Tantangan

1. Permasalahan semakin kompleks
2. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat berkenaan pembangaun desa
3. Kurang memadai prasarana dan sarana yang tersedia tentunya menghambat pembangunan desa

4. Kurang efektifnya koordinasi dan sinkronasi dalam pelaksanaan program pembangunan dan pembinaan
5. Persepsi yang berbeda antara pemerintah daerah dan pemerintah desa
6. Anggapan negatif masyarakat terhadap pemerintah
7. Menurunnya daya beli masyarakat



DAFTAR RIWAYAT

Nama : Firman Rudding
NIM : 501574868
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Tempat/Tanggal Lahir : Bunyu, 25 Oktober 1983
Riwayat Pendidikan : Lulus SDN No. 004 Bunyu Kecamatan
 Bunyu Kabupaten Bulungan Pada Tahun
 1996

Lulus SMPN 06 Juata Laut Kecamatan
 Tarakan Utara Kota Tarakan Tahun 1999

Lulus SMAN 01 Kota Tarakan Tahun 2002

Lulus S1 di Fakultas Sosial dan Ilmu Politik
 Jurusan Ilmu Pemerintahan Tahun 2006
 Universitas Muhammadiyah Malang

Riwayat Pekerjaan : Tahun 2010 s/d 2014 sebagai staf pelaksana
 di Kantor Camat Sesayap Hilir

Tahun 2014 s/d 2015 Sebagai Kasubag
 Perencanaan dan Keuangan di Kantor
 Kecamatan Sesayap Hilir

Tahun 2015 s/d /2017 Sebagai Kasi
 Pemerintahan dan Trantip di Kantor
 Kecamatan Sesayap Hilir

Firman Rudding
NIM. 501574868